

TESIS

**EVALUASI TERHADAP KERANGKA
KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN
GEREJA KATOLIK
(STUDI KASUS DI KEUSKUPAN SURABAYA)**

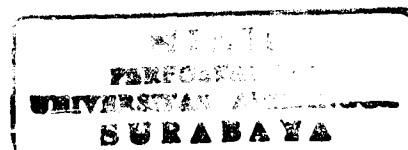


TEA 12/06
Chr
e

OLEH:

R.BERNADINUS CHRISDIANTO

**PASCA SARJANA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**EVALUASI TERHADAP KERANGKA
KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN
GEREJA KATOLIK
(STUDI KASUS DI KEUSKUPAN SURABAYA)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi
Universitas Airlangga

OLEH:

R.BERNADINUS CHRISDIANTO

**PASCA SARJANA PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 7/7 - 2005

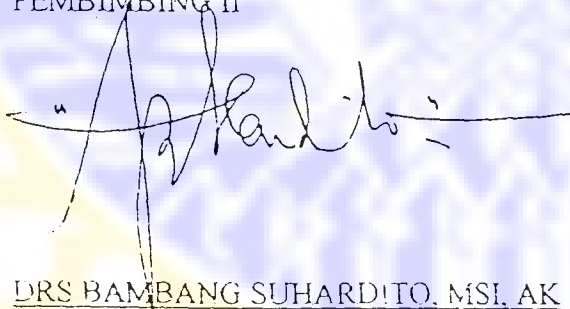
OLEH:

PEMBIMBING I



DRS TJIPTOHADI SAWARJUWONO, MEC, PHD, AK

PEMBIMBING II



DRS BAMBANG SUHARDITO, MSI, AK

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat terang dan rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Evaluasi terhadap Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Gereja Katolik”**, yang merupakan studi kasus di Keuskupan Surabaya. Penyusunan Tesis ini merupakan pemenuhan terhadap salah satu persyaratan kelulusan pendidikan Program Pasca Sarjana Studi Akuntansi Universitas Airlangga.

Penyusunan Tesis ini dapat selesai dengan baik atas bantuan dan dorongan dari berbagai banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan mengikuti pendidikan di Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. Tjiptohadi Sawarjuwono, M.Ec, PhD. Ak, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi serta Pembimbing yang telah memberikan banyak saran, masukan, dan dorongan kepada Penulis.
3. Bapak Drs. Bambang Suhardito, MSi, Ak, sebagai pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dalam bimbingan dan masukan bagi Penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Parwoto W., yang telah memberikan banyak wawasan, masukan dan saran bagi Penulis.
5. Bapak dan Ibu Pengajar yang telah memberikan banyak pengembangan ilmu bagi Penulis selama di kelas, secara khusus kepada Bapak Suyunus yang telah memberikan banyak teladan kepada Penulis selama perkuliahan.

6. Romo Antonius Gozal, Pr, sebagai bendaharawan Keuskupan Surabaya yang telah memberi kesempatan dan informasi.
7. Teman-teman kuliah, yang telah memberikan banyak dorongan serta semangat baik pada waktu kuliah maupun selesainya penulisan Tesis ini.
8. Mbak Susi, Mbak Riska, Mbak Titik, Mas Puji, Mas Fajar atas bantuannya selama penulis mengikuti program pendidikan Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi sampai selesainya Tesis ini.
9. Orang tua (Papa dan Mama) serta saudara-saudaraku yang telah banyak membantu dalam semangat dan doa.
10. Suster Petra, P.Karm dan Suster Christine, P.Karm yang tekun berdoa bagi Penulis.
11. Sobat-sobatku: Budi, Edo, Anet, Mirna, Andy S, Susana, dan teman-teman lain di pelayanan, terima kasih atas dukungannya selama ini.
12. Andrew, Alex, dan Henny, terima kasih buat persaudaraan baru kita.
13. Pihak-pihak lain yang banyak membantu baik itu secara langsung dan tidak langsung yang sangat berguna bagi Penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk membalas kebaikan budi baik semuanya. Tuhan memberkati.

Penulis

RINGKASAN

NAMA: R. BERNADINUS CHRISDIANTO (090214814M)
JUDUL: EVALUASI TERHADAP KERANGKA KONSEPTUAL PELAPORAN KEUANGAN GEREJA KATOLIK (STUDI KASUS DI KEUSKUPAN SURABAYA)

Akuntansi memiliki sifat dinamis karena keadaan perekonomian yang semakin berkembang. Perkembangan akuntansi ditunjang oleh adanya pernyataan APB No 4. APB No 4 berusaha untuk menyediakan suatu struktur yang dapat digunakan sebagai pendekatan penyelesaian beberapa masalah praktik akuntansi yang terkadang belum ada pada standar akuntansi dan seringkali menimbulkan berbagai kesulitan dengan mengembangkan standar yang sudah ada.

Pada kegiatan akuntansi Gereja Katolik, APB No 4 membuka peluang untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik. Gereja Katolik merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi lain sehingga penerapan akuntansi untuk menghasilkan pelaporan keuangan juga harus berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya karakteristik di mana Gereja Katolik berpedoman pada Alkitab sebagai tuntutan kehidupan beragama.

Gereja Katolik membutuhkan kerangka konseptual akuntansi untuk menyusun laporan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kerangka konseptual merupakan suatu pernyataan prinsip teoritikal yang diterima umum dan digunakan sebagai kerangka acuan untuk suatu bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan prinsip teoritikal ini akan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan yang sedang berlangsung, namun praktik pelaporan keuangan yang sedang dikembangkan. Kerangka dasar ini harus menyediakan prinsip teoritikal dalam menentukan pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa ekonomi serta bagaimana harus mengkomunikasikannya kepada pemakai.

Pada lingkungan Gereja Katolik, diharapkan kerangka konseptual yang dihasilkan sesuai dengan tatanan nilai dan lingkungan Gereja Katolik. Kemampuan untuk menghasilkan kerangka konseptual sesuai dengan tatanan nilai dan lingkungan Gereja Katolik diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membentuk prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku bagi Gereja Katolik. Adanya penetapan prinsip-prinsip yang ada akan membantu Gereja Katolik untuk menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan tujuannya. Berdasarkan hasil yang diharapkan dari kegiatan akuntansi Gereja Katolik, maka kerangka akuntansi Gereja Katolik yang ideal adalah kerangka yang dirumuskan dengan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

SUMMARY

NAME: R. BERNADINUS CHRISDIANTO (090214814M)
TITLE: EVALUATION OF FINANCIAL REPORTING CONCEPTUAL FRAMEWORK OF CHURCH ACCOUNTING (CASE STUDY OF SURABAYA'S DIOCESES)

Accounting is dynamic because of the economic that develops. The accounting development is supported by the statement of APB No 4. APB No 4 tries to provide a structure which can be used as a solving method of some problems in accounting practices that sometimes can't be found on accounting standard and often occurs some difficulties with the standard of developing that already exist.

On Catholic Church accounting activities, APB No 4 opens a chance to produce accounting standard which is suitable with Catholic Church's characteristic. Catholic Church is one of the non profit organization that have different characteristics with other organization so accounting usage to make different financial reporting. This is because of the existence of characteristics which Catholic Church accounting based on bible as the demand of religious living.

Catholic Church needs accounting conceptual framework to make a report matched with the demand. Conceptual framework is a theoretical principle statement that is accepted in general and can be used as a model in evaluating financial reporting practice that in progress, but the financial reporting is still improving. This framework must provide theoretical principle in defining of responsibility of economy actions and how to communicate to the users.

On Catholic Church environment, hopefully the conceptual framework that is produced suitable with value and order environment of Catholic Church. The ability to produce conceptual framework is matched with value order and environment of Catholic Church is hopefully can give contribution to build accounting principles that usefull for Catholic Church. The existence of principles helps Catholic Church to arrange accounting suitable with the goal. Based on the expected result from accounting activities of church accounting, so the ideal accounting framework of Catholic Church is framework that composed with truth, honesty, and justice principles.

ABSTRAK

Kemajuan dalam berekonomi menuntut adanya suatu sistem ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan budaya, agama, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk tuntutan tersebut adalah pengembangan akuntansi, dimana salah satunya adalah akuntansi gereja. Gereja sebagai suatu bentuk dari organisasi nirlaba memiliki karakteristik tersendiri berhubungan dengan kegiatan akuntansi.

Pengembangan penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan APB No 4. APB No 4 ada dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah akuntansi baru, yang belum memiliki standar sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman tata cara penyelenggaraan akuntansi. Pendekatan ini cocok untuk diterapkan bagi pengembangan akuntansi Gereja Katolik karena selama ini akuntansi Gereja Katolik belum memiliki standar pelaksanaan yang pasti sehingga tidak ada kerangka dasar yang ideal sebagai arahan untuk membantu menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik.

Kerangka konseptual akuntansi yang ideal diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana Gereja Katolik harus menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi yang ideal untuk Gereja Katolik adalah kerangka konseptual akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik (sesuai dengan ajaran yang ada pada Gereja Katolik).

Kata Kunci: Akuntansi Gereja Katolik, Kerangka Konseptual

ABSTRACT

Improvement in economy demanding an economy system that can be conducted by the society appropriate to culture, religion, level of education, and so on. One of the demand is accounting development where on of it is church accounting. Church as a non profit organization has its own characteristics related to accounting activities.

The developing of Catholic Church accounting arrangement can be done using method of APB No 4. APB No 4 exists within the goal to solve the new accounting problems, which has no standard, so it can be use as a guide of accounting arrangement system. This method is suitable for Catholic Church accounting development because now a days the Catholic Church accounting hasn't got any standard procedure so there's no ideal framework as the direction to produce information as what's expected that's financial information that match with the characteristics of Catholic Church.

The ideal accounting conceptual framework hopefully can be the guide of how Catholic Church should arrange accounting activities. The ideal accounting conceptual framework for Catholic Church is accounting conceptual framework that is suitable with the characteristics of Catholic Church (suitable with the Catholic Church' doctrines).

Key Word: Catholic Church Accounting, Conceptual Framework

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Ucapan Terima Kasih.....	iii
Ringkasan.....	v
Summary.....	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penelitian.....	6
BAB II: KERANGKA TEORI.....	8
2.1. Gereja Katolik.....	8
2.2. Organisasi Nirlaba.....	12
2.2.1. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.....	12
2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.....	14

2.3. Bagian dari Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	16
2.3.1. Laporan Posisi Keuangan.....	16
2.3.2. Laporan Aktivitas.....	16
2.3.3. Laporan Arus Kas.....	17
2.3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	18
2.4. Kerangka Konseptual Akuntansi	19
2.5. Penyelenggaraan Akuntansi pada Organisasi Gereja	21
2.5.1. Hal Pembukuan	24
2.5.2. Hal Pertanggungjawaban.....	24
2.6. Pentingnya Penyelenggaraan Akuntansi bagi Gereja Katolik.....	25
2.7. Proposisi Penelitian	28
BAB III : KERANGKA KONSEPTUAL	30
BAB IV: METODE PENELITIAN	33
4.1. Rancangan Penelitian	33
4.2. Pengembangan Rancangan Penelitian.....	34
4.3. Unit Analisis	34
4.4. Teknik Pengumpulan Data	36
4.5. Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian	37
4.6. Analisis Data.....	38
BAB V : ANALISIS HASIL PENELITIAN	40
5.1. Gambaran Umum Keuskupan Surabaya.....	40
5.1.1. Terbentuknya Keuskupan Surabaya.....	40
5.1.2. Visi dan Misi Keuskupan Surabaya	41

5.1.3. Perkembangan Umat di Keuskupan Surabaya	43
5.1.4. Karya Keuskupan Surabaya	43
5.1.5. Prinsip-Prinsip Dasar Kegiatan di Keuskupan Surabaya	45
5.2. Analisis dan Pembahasan	47
5.2.1. Akuntansi dalam Konteks Organisasi Gereja Katolik.....	47
5.2.2. Deskripsi Kegiatan Akuntansi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya	49
5.2.3. Karakteristik Gereja Katolik terkait dengan Akuntansi	51
5.2.4. Akuntansi sebagai Alat Pertanggungjawaban pada Gereja Katolik.....	53
5.3. Kerangka Konseptual Akuntansi Gereja Katolik	62
5.3.1. Kebutuhan akan Kerangka Konseptual Akuntansi Gereja Katolik.....	62
5.3.2. Kerangka Konseptual yang Ideal bagi Akuntansi Gereja Katolik	63
5.3.3. Tujuan Pelaporan Keuangan Gereja Katolik.....	65
5.3.4. Karakteristik Kualitatif Akuntansi Gereja Katolik.....	67
5.3.5. Elemen Laporan Keuangan Gereja Katolik.....	68
5.3.6. Penilaian dan Pengukuran	72
BAB VI : SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN.....	74
6.1. Simpulan.....	74
6.2. Saran	75
6.3. Keterbatasan Penelitian	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

2.1. Struktur Organisasi Gereja Katolik	10
3.1. Kerangka Konseptual	30



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Metodologi Penelitian
- Lampiran 2 : Laporan Keuangan Keuskupan Surabaya
- Lampiran 3 : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
- Lampiran 4 : Neraca
- Lampiran 5 : Laporan Aktivitas
- Lampiran 6 : Daftar Aktiva Tetap / Inventaris
- Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan penting bagi kehidupan manusia. Transaksi ekonomi yang lazim dilakukan oleh manusia sejak permulaan ekonomi dikenal hingga saat ini tidak dapat disangkal telah mengalami banyak perubahan baik dalam praktik maupun teori-teori yang diperkenalkan mulai dari transaksi yang sederhana (misalnya: barter) sampai dengan yang menggunakan teknologi canggih (misalnya: transaksi melalui internet), namun perubahan-perubahan dan kemajuan tersebut pada intinya masih berkuat pada lingkup penjualan, pembelian, utang-piutang, kepemilikan (harta), modal, dan lain sebagainya.

Kemajuan-kemajuan dalam berekonomi menuntut adanya suatu sistem ekonomi yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan budaya, agama, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk tuntutan tersebut adalah pengelolaan akuntansi. Keragaman transaksi ekonomi membuat kemampuan yang terbatas untuk mengingat semua kejadian-kejadian sehingga disadari akan perlunya suatu sistem akuntansi yang cukup baik sesuai dengan kebutuhan (Hadibroto, 1984:8). Para perancang sistem akuntansi melakukan kerja kerasnya untuk menemukan suatu sistem yang efisien, dapat dikontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perancangan sistem akuntansi yang sudah ada akan

semakin berkembang karena keragaman transaksi ekonomi yang dilakukan, akibat adanya kebutuhan yang berbeda dari masing-masing bidang dalam organisasi sehingga menyebabkan adanya perlakuan akuntansi yang berbeda satu sama lain. Salah satu bentuk pengembangan sistem akuntansi sebagai pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan kegiatan berekonomi adalah akuntansi gereja.

Definisi akuntansi yang ada sangat banyak. Jumingan (2003:57) mendefinisikan akuntansi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, meringkas, menganalisa, dan melaporkan dalam transaksi ekonomi yang dilakukan dalam bentuk keuangan. Akuntansi adalah kegiatan pelayanan, yang fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif terutama keuangan tentang kesatuan ekonomi yang diharapkan bermanfaat untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban bagi penyelenggaraan kegiatan operasi suatu organisasi khususnya yang berhubungan dengan keuangan.

Booth (1993:38) menyatakan bahwa informasi keuangan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi organisasi, baik itu organisasi *profit oriented* maupun nirlaba (tidak mencari keuntungan), sebab informasi akuntansi menyajikan bagaimana posisi keuangan organisasi mengenai bagaimana sumber daya keuangan organisasi didapat dan digunakan pada kegiatan operasi dari organisasi yang bersangkutan. Dengan adanya informasi tentang bagaimana sumber daya keuangan organisasi didapat dan digunakan, maka pihak yang berkaitan dapat menilai bagaimana tanggung jawab pengurus organisasi.

Gereja sebagai suatu bentuk dari organisasi nirlaba memiliki karakteristik tersendiri berhubungan dengan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Gereja merupakan organisasi keagamaan, di mana iman kepercayaan adalah landasan bagi organisasi. Dalam kegiatan operasinya, gereja menyelenggarakan kegiatan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Melalui kegiatan akuntansi, pihak yang diberi wewenang mengelola gereja dapat memberikan informasi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang membutuhkan. Gereja Katolik menyelenggarakan kegiatan akuntansi karena adanya dasar bahwa umumnya manusia adalah makhluk yang lemah dan berpeluang untuk melakukan kesalahan terutama penyelewengan terhadap penggunaan uang (tidak jujur), sehingga dibutuhkan media untuk meminimalisasi kesalahan penyelewengan terhadap penggunaan uang yang dilakukan, yaitu media untuk memenuhi tuntutan bertanggung jawab. Melalui akuntansi, gereja membuktikan bahwa kewajiban bertanggung jawab khususnya yang berhubungan dengan penggunaan keuangan telah dilakukan. Akuntansi akan memberikan informasi bagaimana gereja menggunakan uang yang didapat bagi pengembangan karya-karya anggota struktural gereja.

Pengembangan penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan APB No 4, yang dibuat dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah akuntansi baru, yang belum memiliki standar sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman tata cara penyelenggaraan akuntansi. Pendekatan ini cocok untuk diterapkan bagi pengembangan akuntansi Gereja Katolik karena selama ini akuntansi Gereja Katolik belum memiliki

standar pelaksanaan yang pasti sehingga tidak ada kerangka dasar yang ideal sebagai arahan untuk membantu menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan yaitu informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik.

1.2. Rumusan Masalah

Booth (1993:38) menyatakan bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi organisasi *profit oriented* maupun nirlaba termasuk gereja. Bagi gereja, penyelenggaraan akuntansi yang khususnya diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban seringkali mengalami kesulitan karena standar akuntansi yang sudah ada dan berlaku tidak sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik saat diterapkan, sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik. Di sisi lain APB No 4 menawarkan alternatif untuk melakukan pengembangan terhadap masalah-masalah yang ada dalam bidang akuntansi dengan harapan melalui pendekatan tersebut dapat disusun kerangka yang ideal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti berhubungan dengan pertanyaan berikut ini:

1. Apa karakteristik dasar Gereja Katolik yang perlu dipahami dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik?
2. Bagaimana kerangka konseptual akuntansi Gereja Katolik yang ideal, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik dasar Gereja Katolik yang perlu dipahami dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik.
2. Untuk memperoleh pemahaman bagaimana kerangka konseptual yang ideal untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Gereja Katolik, penelitian ini akan bermanfaat sebagai informasi bagaimana Gereja Katolik sebaiknya menyelenggarakan kegiatan akuntansi serta bagaimana kerangka konseptual yang ideal untuk diterapkan bagi pengembangan akuntansi Gereja Katolik.
2. Bagi dunia akuntansi, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan tentang pengembangan prinsip yang diperlukan bagi organisasi nirlaba, khususnya yang berhubungan dengan organisasi keagamaan yaitu bagi Gereja Katolik.
3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang akuntansi, di mana akuntansi memiliki karakteristik tersendiri di mana akuntansi tersebut diterapkan. Penerapan akuntansi pada Gereja

Katolik tidak seperti pada akuntansi umumnya tetapi sesuai dengan karakteristik Gereja katolik.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan terdiri dari bagian-bagian berikut ini:

- Bab I : Menguraikan tentang latar belakang penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik sebagai salah satu obyek pengembangan bidang akuntansi untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan bidang yang statis tetapi dinamis.
- Bab II : Menguraikan tentang teori sejarah pembentukan Gereja Katolik, laporan keuangan pada organisasi nirlaba, penyelenggaraan akuntansi pada organisasi Gereja, pentingnya penyelenggaraan akuntansi bagi Gereja Katolik, beserta proposisi yang digunakan dalam penelitian.
- Bab III : Menguraikan tentang model kerja penelitian yang merumuskan masalah apa karakteristik dasar yang harus dipahami untuk pengembangan akuntansi Gereja Katolik serta bagaimana kerangka konseptual akuntansi Gereja Katolik yang ideal.
- Bab IV : Menguraikan metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus Yin beserta penggunaan *list item* yang berisi *research questions* untuk pengembangan rancangan penelitian, serta teknik-teknik lain yang berkaitan dengan metode penelitian.
- Bab V : Menguraikan tentang analisis hasil penelitian, karakteristik apa yang harus dipahami dari Gereja Katolik untuk pengembangan penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik serta bagaimana kerangka

akuntansi yang ideal bagi Gereja Katolik berdasarkan pendekatan APB No 4.

Bab VI : Menguraikan tentang simpulan penelitian, bahwa pengembangan penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh Gereja Katolik dan untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan akuntansi Gereja Katolik, diperlukan kerangka konseptual yang ideal, dengan disesuaikan pada karakteristik Gereja Katolik. Saran yang diberikan adalah adanya diskusi lebih lanjut antara anggota Dewan Keuangan Gereja Katolik dengan ahli akuntansi untuk menciptakan standar akuntansi sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi Gereja Katolik. Keterbatasan penelitian adalah sulitnya mendapatkan informasi tentang hubungan akuntansi dan karakteristik Gereja Katolik sebab sumber informasi yang ada tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang akuntansi.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Gereja Katolik

Gereja dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Latin “Ecclesia” yang berarti mereka yang dipanggil. Gereja merupakan persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang meneruskan karya penyelamatan oleh Allah di dunia.

Dalam Kitab Suci, gereja digambarkan sebagai Tubuh Mistik Kristus. Dalam Tubuh itu Kristus dicurahkan ke dalam umat beriman. Sebagaimana tubuh manusia terdiri dari banyak anggota namun membentuk satu tubuh, begitu pula umat beriman dalam Kristus.

Komisi Katekik Komisi Wali Gereja Indonesia (1995:38) menyatakan bahwa Gereja Kristus mempunyai empat sifat, yakni:

1. Gereja disebut Satu, yaitu gereja mengakui satu Tuhan, mengakui satu iman. gereja bersatu dalam iman yang sama, yaitu iman Kristus.
2. Gereja disebut Kudus, yaitu gereja berasal dari yang Kudus, yaitu Allah sendiri. Gereja memiliki tujuan yang kudus, yaitu bersatu dengan Allah sebagai sumber kekudusan.
3. Gereja disebut Katolik, yaitu gereja mewartakan kepenuhan iman. Di dalam dirinya gereja membawa dan melayani keutuhan sarana-sarana keselamatan. Katolik artinya gereja diperuntukkan bagi segala manusia, dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Dengan sifat ini, kehadiran dan keberadaan

gereja tidak membeda-bedakan orang, menurut jenis, kelas sosial, atau latar belakang kebangsaan.

4. Gereja disebut Apostolik, yaitu gereja didirikan atas dasar kesinambungan jabatan dalam kepemimpinan gereja serta kewibawaan dari para pejabat gereja. Pimpinan gereja yang tertinggi, dan tak kelihatan adalah diri Kristus sendiri.

Heuken (1992:290) menyatakan kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdikan dan melayani, seperti yang dicontohkan oleh Kristus sendiri. Untuk tugas pelayanan orang-orang tertentu dipilih oleh Tuhan dengan syarat-syarat khusus. Para pemuka agama Katolik atau kepemimpinan dalam Gereja Katolik merupakan kelanjutan kepemimpinan yang diserahkan oleh Kristus sendiri.

Heuken (1993:290) menjabarkan para pemuka agama dalam Gereja Katolik dari urutan yang tertinggi sampai dengan terendah (susunan hierarki) adalah sebagai berikut:

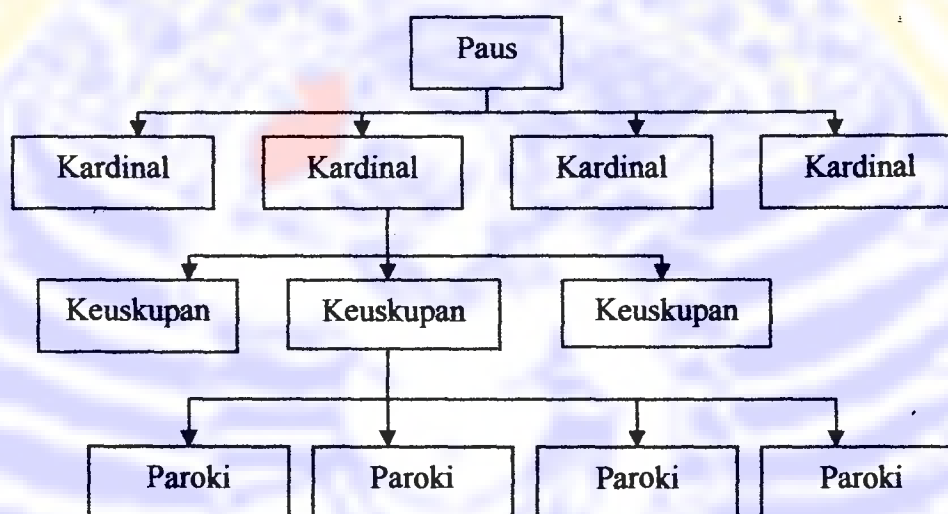
1. Paus adalah pemuka agama Gereja Katolik yang memiliki kuasa tertinggi, sempurna dan universal. Akan tetapi, Paus bukan kepala gereja karena kepala gereja adalah Kristus sendiri dan Paus adalah wakilnya.
2. Kardinal adalah penasihat utama Paus, yang bertugas untuk membantu paus terutama dalam reksa harian seluruh gereja. Para Kardinal membentuk suatu Dewan Kardinal.
3. Uskup adalah pengganti para rasul yang lewat Roh Kudus diangkat menjadi gembala dalam gereja, agar menjadi guru dalam ajaran, iman dalam ibadat suci, dan pelayanan dalam kepemimpinan.

4. Pastor adalah sebutan untuk seorang iman yang memimpin paroki atau kelompok tertentu.

Dari urutan yang dipaparkan maka dapat digambarkan bahwa sistematika struktur organisasi Gereja Katolik secara sederhana adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Gereja Katolik



Sumber: Komisi Katekik Komisi Wali Gereja Indonesia, 1995, Pendidikan Agama katolik: Memahami Keselamatan

Paus adalah pimpinan tertinggi umat Katolik yang berada di Roma. Paus dianggap sebagai penerus dari Yesus untuk meneruskan karya kerasulan di dunia. Paus membawahi kardinal-kardinal yang umumnya ada di ibukota negara. Kardinal membawahi keuskupan-keuskupan yang umumnya ada pada kota-kota besar pada suatu negara. Di bawah keuskupan terdapat paroki-paroki untuk membangun kedekatan dengan umat Katolik.

Menurut Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Surabaya (2000), sumber keuangan Gereja Katolik secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Persembahan, yaitu pemberian sukarela dari umat baik berupa uang maupun barang.
2. Kolekte, yaitu persembahan yang dikumpulkan saat perayaan ekaristi atau ibadat. Kolekte ini umumnya dilakukan setiap minggu oleh gereja saat menyelenggarakan upacara ekaristi.
3. Kolekte khusus, yaitu kolekte yang diadakan untuk maksud tertentu dan harus digunakan sesuai dengan maksud tersebut. Kolekte khusus diadakan apabila ada peristiwa-peristiwa khusus dalam kegiatan Gereja Katolik.
4. Persembahan donatur, yaitu persembahan bulanan secara teratur dari umat untuk kebutuhan pastoral dan kebutuhan paroki.
5. Persembahan untuk maksud tertentu, yaitu persembahan yang harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberi.
6. Iuran stolae, yaitu persembahan yang diberikan dalam rangka penerimaan sakramen dan sakramentali.
7. Stipendium, yaitu persembahan yang diberikan apabila seseorang minta ujud misa.
8. Uang asistensi, yaitu persembahan yang diberikan pada seorang iman yang diminta untuk memimpin perayaan ekaristi.

Sedangkan kegiatan pelayanan yang dibiayai oleh sumber keuangan Gereja Katolik secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Subsidi perbaikan gaji guru dan karyawan di sekolah minus.
2. Subsidi untuk renovasi gedung sekolah minus.
3. Subsidi untuk transportasi karya pastoral paroki yang belum mampu.

4. Pembelian tanah, gereja, pembangunan gereja, kapel. dan pastoran.
5. Pembiayaan karya-karya Pastoral Komisi-Komisi di Keuskupan.
6. Untuk dana kesehatan dan kesejahteraan para iman.
7. Untuk dana kegiatan keuskupan.

Memahami sifat dan susunan hierarki serta adanya kegiatan keuangan dalam operasinya, Gereja Katolik membutuhkan alat pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi dapat digunakan sebagai jembatan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Gereja Katolik dengan menyesuaikan akuntansi yang berlaku umum terhadap karakteristik yang terdapat dalam ajaran Gereja Katolik.

2.2. Organisasi Nirlaba

2.2.1. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Perbandingan terdekat untuk dapat dipilih untuk menyusun pelaporan keuangan Gereja Katolik adalah organisasi nirlaba atau organisasi yang didirikan dengan tujuan tidak mencari keuntungan. Ikatan Akuntan Indonesia (2002) menyatakan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia (2001:2) pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba menyelenggarakan pelaporan

keuangan yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktik organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada beberapa organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya.

Para pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu untuk menilai:

1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
2. Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer.

Kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih baik yang

terikat maupun tidak terikat penggunaannya. Pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas harus menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih.

2.2.2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Menurut Anthony (1978:11) banyak aspek dari keputusan yang diambil dimaksudkan untuk: mengalokasikan dana kepada lembaga pemerintah, untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit, gereja, universitas, dan lainnya. Salah satu kesamaan pokok antara perusahaan *profit oriented* dengan organisasi nirlaba (tidak mencari keuntungan) adalah pengambil keputusan melihat cara untuk mencapai tujuan masing-masing yaitu mendasarkan informasi sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Tujuan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba adalah untuk menaksir kemungkinan manfaat yang diperoleh dari keputusan yang diambil para pengambil keputusan untuk mencoba menilai kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini ditegaskan oleh Birkett dan Chua (1988:1) yang menyatakan para pengambil keputusan dapat mempengaruhi tujuan organisasi, misalnya jika donatur membatasi bantuan khusus untuk tujuan tertentu yang dapat membantu tujuan atau kegiatan organisasinya.

Karena tujuan organisasi nirlaba adalah bersifat non keuangan, maka indikator dalam menghitung kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba seperti perusahaan *profit oriented* tidak begitu berperan untuk menilai prestasi. Indikator yang lebih bermanfaat adalah jika didasarkan atas tujuan utama dari organisasi nirlaba tersebut. Tetapi hal ini sulit untuk dilakukan sebab tujuannya sendiri bersifat kualitatif bukan moneter atau keuangan.

Solomons (1986:81) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bagi organisasi *non profit* (nirlaba) adalah sebagai berikut:

1. Financial reporting by non business organization should provide information that is useful to present and potential resource providers and other users in making rational decisions about the allocation of resources of those organization.
2. Financial reporting should provide information to help present and potential resources providers and other users in assessing the services that a non business organization's provides and its ability to continue to provide those services.
3. Financial reporting should provide information that is useful to present and potential resource providers and other users in assessing how managers of a non business organization have discharged their stewardship responsibilities about other aspects of their performance.
4. Financial reporting should provide information about the economic resources, obligation, and net resources of an obligation, and the effects of transactions, events, and circumstances that change resources and interests in those resources.
5. Financial reporting should provide information about the performance of an organization during a period. Periodic measurement of the changes in the amount and nature of net resources of a non business organization and information about the service efforts and accomplishments of and organization together represent the information most useful in assesing its performance.
6. Financial reporting should provide information about how an organization obtains and spends cash or other liquid resources, about its borrowing and repayment of borrowing, and about other factors that may affect an organization's liquidity.
7. Financial reporting should include explanations and interpretations to help user understand financial information provided.

2.3. Bagian dari Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Ikatan Akuntan Indonesia (2002) laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

2.3.1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan diantar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai:

1. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, dan
2. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan posisi keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, aktiva bersih.

2.3.2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih,

2. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan
3. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk:
 - a. Mengevaluasi kinerja anggota organisasi dalam pelaksanaan tugas selama periode waktu tertentu
 - b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa
 - c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan keuangan aktivitas mencakup kegiatan organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

2.3.3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Melalui laporan arus kas ini dapat diketahui darimana sumber-sumber keuangan diperoleh dan bagaimana sumber-sumber tersebut digunakan untuk kegiatan operasi. Laporan arus kas pada

organisasi nirlaba sama dengan arus kas pada organisasi bisnis, dengan tambahan sebagai berikut:

1. Aktivitas pendanaan:
 - a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang.
 - b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi.
 - c. Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
2. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas; sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Duncan dan Dale (1999:15) menyatakan gereja mendapatkan sumber daya keuangan dari persembahan umatnya. Sumber daya keuangan dibuat untuk menolong para pemimpin gereja dalam upaya mengembangkan tugas panggilannya. Laporan arus kas bagi gereja akan memberikan pengendalian bagi penggunaan sumber daya keuangan khususnya untuk mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan yang diperoleh sebab laporan arus kas memberikan deskripsi bagaimana kas yang diperoleh dipergunakan oleh para pemimpin gereja.

2.3.4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan menyajikan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh organisasi nirlaba. Catatan atas laporan keuangan memudahkan pembaca untuk lebih memahami laporan keuangan.

2.4. Kerangka Konseptual Akuntansi

Susanto (1997:30) menyatakan bahwa kerangka konseptual merupakan pernyataan tentang prinsip teoritikal yang diterima umum, yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk suatu lapangan tertentu. Dalam konteks akuntansi, prinsip teoritikal seperti ini menyediakan acuan untuk mengevaluasi praktik yang sedang berlaku maupun untuk mengembangkan praktik pelaporan akuntansi yang baru. Kerangka konseptual akuntansi (*conceptual framework for financial reporting*) tidak sama dengan standar akuntansi. Standar akuntansi ditetapkan sebagai suatu aturan yang harus dipatuhi oleh badan usaha dalam menyusun laporan keuangan, sedangkan kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman bagi badan penyusun standar dalam menetapkan standar akuntansi. Manfaat dari adanya kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kerangka konseptual akuntansi menyediakan suatu disiplin yang berguna bagi badan penyusun standar akuntansi.

Suatu proses penetapan standar akuntansi mencakup suatu *trade-off* antara pemikiran konseptual yang logis dengan tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, yang tidak puas dengan akibat ditetapkannya standar akuntansi tertentu. Dalam keadaan ini, penetapan standar akuntansi merupakan suatu pekerjaan yang sulit karena harus mengusahakan suatu titik temu antara logika dan tekanan. Salah satunya pertahanan yang dapat digunakan oleh badan penyusunan standar untuk menghadapi tekanan atau campur tangan politik dalam proses penetapan standar akuntansi ini adalah kemampuan untuk menunjukkan bahwa standar akuntansi yang diusulkan

tersebut disusun berdasarkan suatu dasar teoritik atau kerangka konseptual. Tentu saja, apabila badan penyusunan standar berpandangan bahwa misinya adalah lebih bersifat politik dan bukan bersifat konseptual, maka kerangka konseptual bukanlah merupakan suatu faktor keberhasilan yang diperlukan oleh badan penyusunan standar tersebut.

2. Kerangka konseptual akuntansi akan membantu berbagai pihak yang memberikan respon terhadap *exposure draft* untuk memberikan komentar dengan dasar yang sama seperti yang digunakan dalam standar akuntansi.

Kerangka konseptual akuntansi akan mengurangi argumentasi yang emosional termasuk ancaman tidak berhasilnya implementasi standar akuntansi yang diusulkan. Berbagai komentar terhadap *exposure draft* yang disusun atas dasar kerangka konseptual yang sama akan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan suatu standar akuntansi. Diharapkan, dengan demikian standar akuntansi yang dihasilkan mampu melingkupi seluruh kebutuhan praktek akuntansi sehingga ada kemudahan dalam melakukan kegiatan akuntansi karena ada standar sebagai pedoman.

3. Kerangka konseptual akuntansi diperlukan sebagai ukuran untuk mengevaluasi penyusunan standar akuntansi.

Hal yang ideal adalah suatu keadaan di mana kerangka konseptual dapat dikembangkan sebelum badan penyusunan standar mulai menerbitkan standar akuntansi. Para anggota badan penyusunan standar dapat mengetahui sebelumnya bahwa keputusan yang mereka tentukan akan dibatasi oleh

kerangka konseptual. Akan tetapi, kenyataannya hampir semua negara telah memiliki badan penyusun standar sebelum kerangka konseptual dikembangkan. Walaupun keadaan ini cenderung akan mengurangi efektivitas kerangka konseptual yang telah disusun, akan tetapi kerangka konseptual tersebut akan tetap berguna sebagai suatu dasar untuk mengevaluasi pekerjaan badan penyusun standar.

FASB (1984) menyatakan bahwa kerangka konseptual yang disepakati akan memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat mengarahkan badan penyusunan standar dalam menetapkan standar akuntansi yang berlaku sehingga praktik akuntansi menjadi konsisten dan dapat mengarahkan praktik akuntansi masa mendatang.
2. Memberi landasan kepada praktisi untuk menyelesaikan permasalahan perlakuan akuntansi tertentu, seandainya belum ada standar yang mengatur.
3. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai terhadap arti penting dan keterbatasan-keterbatasan informasi dalam laporan keuangan.
4. Melindungi akuntansi sebagai profesi dari politisasi (tekanan) pihak-pihak tertentu.

2.5. Penyelenggaraan Akuntansi pada Organisasi Gereja

Gereja adalah salah satu dari bentuk organisasi nirlaba, yang juga menyelenggarakan akuntansi. Penyelenggaraan akuntansi di gereja sudah sewajarnya ada sebab salah seorang tokoh gereja, yaitu Luca Pacioli seorang Fransiscan juga merupakan tokoh dalam pengembangan akuntansi dengan buku

yang dipublikasikan yaitu *Summa de Arithmetica Geomeria, Proportioni et Proportionalita* yaitu tentang pembukuan berpasangan. Dasar dari penyelenggaraan akuntansi gereja adalah akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Boyce (1984:37) siapapun yang bertanggung jawab kepada orang lain atas tindakan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Hal ini berarti yang bersangkutan bertanggung jawab (*accountable*) kepada pihak yang memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut disebabkan karena ketentuan hukum perjanjian, kebijaksanaan perusahaan atau kewajiban moral.

Harahap (2002:214) berpendapat *accountability* adalah suatu istilah yang sangat luas dan mencakup pengurusan atau *stewardship*. *Stewardship* berarti pengurusan kekayaan perusahaan secara efisien dan pelaksanaan setiap rencana dalam memelihara dan menggunakan kekayaan tersebut secara efisien. Laporan mengenai pengurusan yang dilakukan manajemen telah diakui sebagai salah satu tujuan utama dari laporan keuangan. Namun tanggung jawab manajemen sebenarnya lebih luas daripada apa yang dimaksudkan dalam ruang lingkup *stewardship* itu sendiri. Batas tanggung jawab yang digambarkan dalam akuntansi pertanggungjawaban (*accountability*) itu adalah saling terkait, mengikuti garis yang ada dalam struktur organisasi. Organisasi bertanggung jawab kepada mereka yang memberikan dana (Gray, 1996:23).

Belkaoui (1993:338) berpendapat bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah ekspresi tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah proses komunikasi sosial dan lingkungan akibat tindakan ekonomi organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan jawaban

atas pelaporan tradisional yang hanya memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dukungan sepenuhnya pada akuntansi pertanggungjawaban yang disajikan oleh suatu organisasi yang:

1. Mengasumsikan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk meningkatkan citra organisasi dan memegang asumsi, biasanya secara implisit, bahwa perilaku organisasi baik secara asasi.
2. Mengasumsikan bahwa tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk menghentikan pertanggungjawaban organisasi dengan asumsi kontrak sosial terjadi antara organisasi dengan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini membutuhkan berhentinya pertanggungjawaban sosial.
3. Tampaknya mengasumsikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban secara efektif memperluas pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberi informasi investor.

Armacost dan Schneider (2000:36) menyatakan gereja wajib menyelenggarakan akuntansi. Gereja mendapatkan sebagian besar sumber daya baik itu sumber daya berupa moneter maupun non moneter dari para umat yang dimiliki dalam bentuk persembahan yang diperlukan. Para umat menginginkan adanya informasi tentang penggunaan sumber daya tersebut sehingga gereja membutuhkan sarana sebagai informasi. Sarana informasi dapat diperoleh gereja dengan penyelenggaraan akuntansi. Floyd (1969:56) berpendapat bahwa penyelenggaraan akuntansi gereja pada umumnya sama dengan organisasi nirlaba lainnya, tetapi ada tujuan tambahan bahwa penyelenggaraan akuntansi gereja memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab terhadap sesama dan

tanggung jawab terhadap Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perikop-perikop yang ada pada alkitab sebagai kitab suci gereja.

2.5.1. Hal Pembukuan

Lukas 1:1-3: Pendahuluan

Banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita, seperti yang telah disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan Firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.

Memahami perikop tersebut, gereja mengajarkan bahwa pentingnya penyelenggaraan pembukuan adalah untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, untuk mengetahui kebenaran peristiwa tersebut untuk periode mendatang sebagai bukti kebenaran yang ada. Definisi pembukuan oleh ajaran gereja hampir sama dengan definisi akuntansi yaitu sebagai kegiatan mencatat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk keuangan untuk kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

2.5.2. Hal Pertanggungjawaban

Matius 22:17-22: Tentang Membayar Pajak Kepada Kaisar

Katakanlah kepada kami pendapatMu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Kristus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata: Mengapa kamu mencobai Aku hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaKu mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa satu dinar kepadaNya. Maka Ia bertanya kepada mereka: Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka: Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Kristus berkata kepada mereka: Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Kristus lalu pergi.

Melihat perikop tersebut ada hal yang didapat, bahwa gereja melalui alkitab mengajarkan untuk bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai sesama manusia dan Tuhan sehingga di sini ada pertanggungjawaban secara vertikal kepada Tuhan dan horisontal kepada sesama manusia.

Stock (1995:56) memberikan deskripsi bagaimana gereja menyelenggarakan akuntansi keuangan. Deskripsi tersebut adalah sebagai berikut:

“As non profit organizations, churches operate under fund accounting. While fund structures vary some what from church, there are some common patterns. The general fund or operating fund covers expenses incurred to operate the church. These expenses include salaries and benefits of church staff, utilities, maintenance on church staff, utilities, maintenance on church buildings and vehicles, offices supplies, and material needed to run the various church programs. Contributions given to the church without any spesific designation are credited to general fund”.

2.6. Pentingnya Penyelenggaraan Akuntansi bagi Gereja Katolik

Lightbody (2000:9) menyatakan bahwa banyak organisasi nirlaba termasuk gereja menyelenggarakan akuntansi tanpa disadari. Penyelenggaraan akuntansi yang dilakukan meskipun secara sederhana namun berguna sebagai alat pertanggungjawaban. Harper dan Harper (1988:34) menyatakan bahwa organisasi nirlaba seperti gereja perlu menyelenggarakan akuntansi secara sistematis untuk mengendalikan operasi yang dilakukan dari penyelewengan-penyelewengan. Harper dan Harper dalam penelitian tentang *Price the Lord* (PTL) yaitu sebuah organisasi keagamaan yang bergerak dalam *broadcasting* menemukan bahwa tidak diselenggarakan akuntansi membuat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat gereja, terlebih gereja adalah organisasi yang tidak memiliki kewajiban khusus seperti organisasi yang *go public* yang dituntut untuk

menyelenggarakan akuntansi oleh Badan Pengawas Pasar Modal di negara yang bersangkutan, sehingga dalam hal tuntutan membuat pelaporan akuntansi masih kurang.

Davis (2001:1) menyatakan bahwa seperti halnya organisasi bisnis, maupun organisasi nirlaba lainnya, gereja membutuhkan akuntansi yang dituangkan dalam pembuatan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang dibuat gereja memberikan banyak manfaat, antara lain untuk perencanaan dalam rangka pengembangan gereja maupun sebagai alat pertanggungjawaban pengurus gereja. Sebagai alat pertanggungjawaban, anggaran keuangan dapat digunakan sebagai komitmen para dewan gereja untuk bekerja sesuai dengan apa yang dianggarkan, sehingga melalui perbandingan anggaran dan realisasi ada pertanggungjawaban para dewan gereja terhadap apa yang telah dikomitmenkan terutama komitmen tersebut bukan hanya bagi gereja tetapi komitmen yang diberikan bagi Tuhan.

Penyelenggaran anggaran dalam operasi kegiatan gereja di diilhami dari Kitab Suci, yaitu:

Lukas 17:28-30: Tentang Anggaran

Sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata: "Orang itu, mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya".

Pendapat Davis didukung oleh Kluver (2001:43) yang menyatakan bahwa penganggaran, sebagai bagian dari akuntansi diperlukan agar mendapatkan laporan keuangan yang diinginkan. Penganggaran berfungsi sebagai alat

pengawas agar laporan keuangan yang diinginkan dapat dicapai. Gereja sebagai salah satu bentuk organisasi non profit menyelenggarakan anggaran, hanya saja penyusunan penganggaran dilakukan sesuai dengan budaya (ajaran) gereja sehingga nantinya hal ini juga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan gereja.

Blackbeard (2003:2) berpendapat akuntansi adalah hal penting bagi gereja dan organisasi keagamaan lainnya, sebab gereja dan organisasi keagamaan lainnya tidak hanya organisasi yang sekedar menerima dan mengeluarkan sejumlah uang saja, sehingga banyak pihak melupakan penyelenggaraan akuntansi. Hal terpenting bagi gereja, akuntansi dapat berperan sebagai alat pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Tuhan dalam bentuk kejujuran dari pengelola gereja dan horisontal kepada manusia yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran harta benda gereja.

Komisi Wali Gereja Indonesia (2001:356) menyatakan bahwa mengenai harta benda yang oleh umat beriman dipersembahkan kepada gereja, para pengelola hendaknya memberikan pertanggungjawaban kepada umat beriman menurut norma-norma yang berlaku. Memahami hal ini, pertanggungjawaban harus yang sebenarnya, sehingga memunculkan alat pertanggungjawaban keuangan atau yang secara sederhana dikenal dengan pembukuan atau akuntansi.

Laughlin (1990:93) menyatakan hal yang mendasari gereja untuk menyelenggarakan akuntansi karena ada kontrak antara *principle* dan *agent*. Kontrak antara *principle* dan *agent* merupakan perwujudan dari *agency theory*. Wolk dan Tearney (1997:226) menjelaskan bahwa *agency theory* digambarkan sebagai titik temu hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (*principle*) dan

manajemen perusahaan (*agent*) dan berusaha memberi suatu pemahaman perilaku organisasional dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan untuk memaksimalkan utilitas mereka. Dalam gereja, para umat dan Kristus dianggap sebagai *principle* dan pengelola gereja adalah *agent* yang harus bertanggung jawab terhadap *principle*. Akuntansi dalam hal ini dapat dipakai sebagai alat pertanggungjawaban.

2.7. Proposisi Penelitian

Proposisi penelitian berfungsi untuk mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya (Yin 1988:30). Dengan proposisi akan menghindarkan peneliti untuk mengumpulkan segala sesuatu yang tidak mungkin atau perlu. Proposisi penelitian ini adalah: penyelenggaraan akuntansi dalam gereja sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Alkitab sebagai pegangan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan beragama membuat Gereja Katolik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi lainnya dalam menyelenggarakan akuntansi.
2. Anggota struktural Gereja Katolik adalah orang atau manusia yang memiliki kelemahan, sehingga memungkinkan melakukan kelalaian dalam hal pengelolaan dana Gereja Katolik sehingga membutuhkan alat pertanggungjawaban pengelolaan dana Gereja Katolik.
3. Teori keagenan memandang bahwa suatu organisasi termasuk Gereja Katolik mempunyai hubungan kontrak antara agen dan prinsipal yang mana

agen harus bertanggung jawab kepada prinsipal. Alat pertanggungjawaban yang digunakan adalah pelaporan keuangan dari kegiatan akuntansi.

4. Akuntansi Gereja Katolik memerlukan kerangka konseptual yang ideal sebagai standar dalam penerapan akuntansi guna mempermudah pelaksanaan kegiatan akuntansi Gereja Katolik.

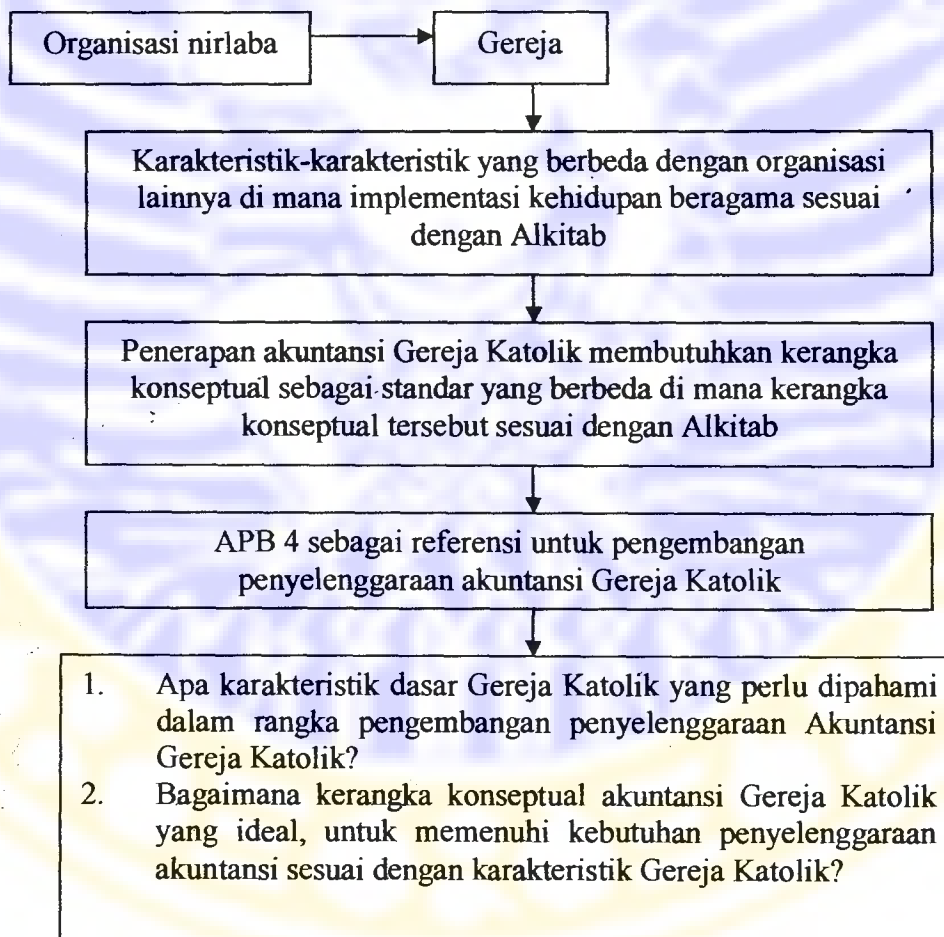
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual diperlukan untuk model kerja di dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan kerangka konseptual, peneliti akan memiliki gambaran yang jelas tentang obyek penelitian dan hubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya.

Gambar 3.1.

KERANGKA KONSEPTUAL



Salah satu bentuk dari organisasi adalah organisasi nirlaba yang tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi nirlaba lebih mengutamakan pada tujuan pelayanan masyarakat secara umum. Salah satu bentuk organisasi nirlaba adalah Gereja Katolik. Gereja Katolik dalam operasi keuangan juga menyelenggarakan akuntansi untuk alat pertanggungjawaban operasi keuangan.

Penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik membutuhkan prinsip tersendiri tidak seperti akuntansi umumnya sebab penggunaan akuntansi Gereja Katolik memiliki karakteristik khusus yaitu disesuaikan penyelenggaraan akuntansi dengan ajaran Alkitab sebagai pedoman ajaran Gereja Katolik. Seringkali, penyelenggaraan akuntansi dalam Gereja Katolik terbentur dengan adanya beberapa masalah dalam Gereja Katolik yang tidak diatur dalam standar akuntansi yang berlaku umum, karena belum adanya kerangka konseptual dan standar bagi akuntansi Gereja Katolik untuk dasar pelaksanaan akuntansi Gereja Katolik, sebagai contoh mengenai prinsip pengukuran yang menyatakan bahwa semua unit harus dapat diukur sesuai dengan mata uang yang berlaku, akan tetapi sebagian sumber daya gereja adalah berupa barang sehingga akan menjadi kesulitan bagi Gereja Katolik untuk melaporkan dalam pelaporan akuntansi karena sulit untuk mengukur dalam bentuk mata uang yang berlaku. Hal yang mendukung keadaan ini adalah penelitian Brucket dan Swinde (1988:27) yang menyatakan bahwa organisasi non bisnis memerlukan metode akuntansi tertentu karena terkadang metode akuntansi yang berlaku umum tidak dapat melapis seluruh kegiatan organisasi non bisnis karena karakteristik-karakteristik tertentu

yang berbeda dengan perusahaan bisnis. Sebagai akibatnya, organisasi non bisnis termasuk Gereja Katolik memerlukan kerangka konseptual yang berguna sebagai dasar membentuk kebijakan-kebijakan tertentu dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum bagi organisasi non bisnis termasuk Gereja Katolik. Pernyataan ini semakin didukung kuat dengan adanya APB 4 yang memberikan pendekatan untuk mengembangkan standar akuntansi bagi peristiwa-peristiwa akuntansi secara khusus yang selama ini belum memiliki standar yang jelas sehingga dengan demikian diharapkan akan menghasilkan kerangka konseptual yang sesuai sebagai standar untuk menghasilkan informasi akuntansi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dasar Gereja Katolik yang perlu dipahami dalam rangka pengembangan penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik dan pemahaman tentang bagaimana Gereja Katolik menyelenggarakan kegiatan akuntansi tersebut. Karena tujuan ini, pendekatan penelitian yang dipilih adalah studi kasus, karena cocok dengan penelitian yang berkenaan dengan “*how*” atau “*why*” (Yin 1988:10). Hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan para peneliti yang menggunakan metode studi kasus untuk penelitian yang sejenis, seperti yang dilakukan oleh Petroni (1999) dan Warindrani (2003). Petroni (1999) berhasil menggunakan metode studi kasus untuk mengetahui dan memahami apa (*what*) manfaat-manfaat yang didapat dari pengelolaan sistem informasi pada perbankan guna menghadapi ketidakpastian lingkungan usaha. Warindrani (2003) berhasil menggunakan metode studi kasus untuk mengetahui dan memahami bagaimana (*how*) sistem informasi operasional dan sistem pakar dapat dikembangkan dalam proses percepatan pelayanan kredit di sebuah bank.

Lingkungan penelitian adalah Gereja Katolik yang berada di Keuskupan Surabaya. Dengan lingkungan penelitian Gereja Katolik yang berada di Keuskupan Surabaya diharapkan telah mewakili seluruh Gereja Katolik karena

Gereja Katolik memiliki asas universal, yaitu keseragaman untuk semua Gereja Katolik di seluruh dunia.

4.2. Pengembangan Rancangan Penelitian

Untuk mempermudah pengembangan rancangan penelitian, dibuat *list of items*, yang berisi dari *research questions* dari rumusan masalah yang ditetapkan. Pada rumusan masalah apa karakteristik dasar Gereja Katolik yang perlu dipahami dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik, *research questions* yang dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karakter-karakter Gereja Katolik terkait dengan masalah pengelolaan keuangan menurut ajaran Gereja Katolik yaitu Alkitab. Berdasarkan rumusan masalah bagaimana kerangka konseptual akuntansi Gereja Katolik yang ideal, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik maka *research questions* yang dikembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang telah dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya.

4.3. Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan dukungan *research questions* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan gereja terdiri dari laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta catatan kegiatan keuangan Gereja Katolik. Dari laporan

keuangan tersebut dapat dipahami bagaimana gereja menyelenggarakan kegiatan akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan Keuangan didapatkan dengan teknik dokumentasi beserta wawancara, yang meliputi wawancara dengan romo bendaharawan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan akuntansi dilakukan serta wawancara dengan staf bagian akuntansi untuk mengetahui pemahaman staf bagian akuntansi terhadap standar akuntansi yang berlaku umum.

2. Kontrak kerja adalah bukti tertulis gereja dengan pihak-pihak lain, misalnya pembangunan gereja maka bentuk kontrak kerja adalah gereja dengan kontraktor, sehingga dapat diketahui antara kesesuaian pengakuan biaya pembangunan dengan laporan keuangan. Kontrak kerja didapatkan dengan mendokumentasikan beberapa kontrak kerja yang dilakukan oleh gereja Katolik Keuskupan Surabaya.

3. Dokumen-dokumen Permanen

Dokumen-dokumen permanen lainnya, misalnya surat kepemilikan tanah, dari mana saja gereja mendapatkan aktiva tersebut, dan bagaimana sifat dari aktiva tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dokumen-dokumen permanen didapatkan dengan teknik pendokumentasian terhadap dokumen-dokumen yang ada.

4. Anggaran

Anggaran adalah rencana dalam hal ini rencana keuangan yang dibuat oleh pengelola dalam melaksanakan aktivitas operasional gereja selama periode tertentu. Melalui anggaran dapat diketahui bagaimana cara pengendalian

yang dilakukan oleh pengelola terhadap keuangan Gereja Katolik. Anggaran didapat dengan teknik pendokumentasian anggaran dan wawancara terhadap penyelenggaraan anggaran untuk mendapatkan informasi yang diperlukan khususnya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Wawancara.**

Wawancara dilakukan dengan romo bendaharawan, romo paroki, serta umat Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui pandangan tentang pentingnya penyelenggaraan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban secara vertikal dan horisontal di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya.

2. **Observasi**

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara Gereja Katolik Keuskupan Surabaya selama ini melakukan kegiatan akuntansi serta apa yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan akuntansi tersebut.

3. **Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai contoh hasil dari penyelenggaraan kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya untuk mendukung observasi yang dilakukan.

4.5. Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan *key informan*. Hal ini penting untuk menentukan titik berat informasi yang didapatkan. Sebagai *key informan* adalah romo bendaharawan Gereja Keuskupan Katolik Surabaya yang mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntansi di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya.
2. Mendokumentasikan pelaporan keuangan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang meliputi seluruh bentuk pelaporan keuangan yang dihasilkan beserta dokumen-dokumen yang mendukung seperti: anggaran, dokumen-dokumen permanen, dan kontrak kerja.
3. Melakukan wawancara dengan romo bendaharawan di mana akuntansi diselenggarakan beserta para staf akuntansi keuskupan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pendukung bahwa Gereja Katolik melakukan penyelenggaraan akuntansi.
4. Melakukan wawancara dengan romo paroki, mengenai pentingnya penyelenggaraan akuntansi bagi Gereja Katolik terkait dengan pertanggungjawaban terlebih ditinjau dari sudut pandang Alkitab sebagai kebenaran umat Katolik.
5. Melakukan wawancara dengan umat Gereja Katolik untuk mendapatkan informasi bagaimana kesadaran umat Gereja Katolik akan perlunya akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban Gereja Katolik.
6. Membahas, menganalisis dan menyimpulkan seluruh informasi yang ada.

4.6. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan deskriptif dan *explanation building*. Analisis deskriptif dilakukan dengan menekankan pada hasil dari wawancara dengan *key informan* dengan tujuan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan akuntansi pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. *Key informan* adalah romo bendaharawan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan akuntansi di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dengan pertimbangan subyek dapat memberikan keterangan dan sumber-sumber lain serta menciptakan sumber akses terhadap sumber bukti yang diperlukan.

Analisis deskriptif dengan menggunakan proposisi-proposisi penelitian dan menekankan pada hasil wawancara *key informan*. Analisis deskriptif akan mendeskripsikan pelaporan keuangan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kegiatan atau transaksi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya.
2. Mengklasifikasikan seluruh kegiatan atau transaksi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan.
3. Mengklasifikasikan seluruh informasi yang diungkapkan pada pelaporan keuangan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya ke dalam tujuan-tujuan laporan keuangan Gereja Katolik. Klasifikasi didasarkan pada Kerangka Konseptual Akuntansi tentang bagaimana pengungkapan seharusnya dilakukan pada pelaporan keuangan.

Pada analisis kedua, yaitu *explanation building* yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan suatu pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksi, pola yang diprediksi berupa proposisi-proposisi penelitian. Dalam penelitian ini, yang akan dibandingkan adalah praktek penerapan akuntansi pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya beserta fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban secara vertikal dan horisontal dengan proposisi-proposisi penelitian. Untuk lebih mudah memahami metode penelitian dalam penulisan ini maka dapat dilihat tabel pada lampiran 1.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum Keuskupan Surabaya

5.1.1. Terbentuknya Keuskupan Surabaya

Terbentuknya Gereja Katolik Keuskupan Surabaya tidak dapat lepas dari proses terbentuknya hirarki Keuskupan di Indonesia. Tanggal 3 Januari 1961 Bapa Suci Johannes XXIII mengeluarkan sebuah dekrit mengenai berdirinya hirarki di Indonesia, maka sejak saat itu Vikariat Apostolik Surabaya menjadi Keuskupan Surabaya yang merupakan Subfragan dari Keuskupan Agung Semarang. Berdirinya hirarki tadi sebenarnya juga permintaan dari Wali Gereja Indonesia yang pada tanggal 12 Mei 1960 berkirin surat ke Roma, dan ditandatangani oleh semua Wali Gereja, yang isinya mohon didirikan Hirarki di Indonesia.

Pada tanggal 9 September 1961, diangkat Mgr. Johannes Klooster, CM sebagai Uskup Surabaya, dan pada hari tersebut beliau melakukan sumpah menjadi warga negara Republik Indonesia. Tahun 1964, Rm. A.J. Dibjajarjono, Pr. Diangkat sebagai Vikaris Jendral (Vikjen) Keuskupan Surabaya. Setelah menjadi Wali Gereja di Surabaya, hampir tiga puluh tahun, maka pada tanggal 16 Desember 1982, Mgr. Johannes Klooster, CM mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Vikjennya yaitu Rm. A.J. Dibjajarjono, Pr pada tanggal 2 April 1982, yang baru ditabiskan tanggal 16 Desember 1982. Selama 11 tahun menggembalakan umat di Keuskupan Surabaya maka pada tanggal 15 Maret 1994, Mgr. A.J. Dibjajarjono, Pr. mengundurkan diri dari jabatan dengan alasan

usia dan kesehatan, kemudian digantikan oleh Mgr. Johannes Hadiwikarta, Imam Diosesan dari Keuskupan Agung Semarang. Mgr. Johannes Hadiwikarta ditahbiskan pada tanggal 25 Juli 1994. Kurang lebih sepuluh tahun kemudian, tanggal 13 Desember 2003 Mgr. Johannes Hadiwikarta meninggal karena sakit dan untuk sementara digantikan oleh Adimistrator Diosesan Yulius Haryanto, CM sampai sekarang.

5.1.2. Visi dan Misi Keuskupan Surabaya

Setelah mengunjungi semua paroki dan biara di Keuskupan Surabaya serta mengadakan pertemuan dengan berbagai kelompok umat di Keuskupan Suarabaya, dirasa perlu adanya visi dan misi bersama untuk dijadikan arah dan pegangan bagi semua imam, dewan paroki dan seluruh umat di Keuskupan Surabaya. Setelah diadakan persiapan, maka pada tanggal 20-22 November 1996 diadakan Sinode Keuskupan Surabaya yang dihadiri oleh semua imam Keuskupan Surabaya. Hasil dari visi dan misi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Visi Keuskupan Surabaya

Persekutuan umat Allah yang dinamis, profetis, missioner, berkualitas, akrab dalam persaudaraan, yang hidupnya berpusat pada Yesus Kristus, pastor bonus, serta dibimbing oleh Roh Kudus, sebagai musafir yang peka melihat tanda-tanda jaman, punya kepedulian pada sesamanya, terutama yang kecil dan menderita, berani memperjuangkan keadilan dan kebenaran, membina persaudaraan sejati dengan semua orang demi terwujudnya Kerajaan Allah di dunia.

2. Misi Keuskupan Surabaya

Demi tercapainya visi di atas maka ada beberapa langkah yang perlu diambil dan dilakukan untuk ditetapkan sebagai misi Keuskupan Surabaya, yaitu hal-hal berikut ini:

- a. Membuka diri dalam dialog kehidupan dan karya dengan semua umat beragama yang ada, serta membina persaudaraan sejati dengan semua orang. Hal ini sesuai dengan sifat dasar Gereja Katolik yaitu universal, di mana Gereja Katolik membuka diri untuk umum.
- b. Membangun solidaritas pro aktif bagi mereka yang lemah dan menderita, membela kehidupan dan martabat manusia sebagai citra Allah dengan melakukan pendampingan kepada kaum yang lemah dan menderita.
- c. Membangun komunitas persaudaraan, kristiani yang kokoh imannya, yang berakar pada Kitab Suci, tradisi dan sakramen-sakramen serta kebudayaan setempat.
- d. Membangun persaudaraan di antara umat, mulai dari keluarga, lingkungan, paroki dengan melalui pola kepemimpinan yang partisipatif, komunitas basis gerejani dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke keluarga, lingkungan, dan paroki yang ada.
- e. Membentuk orang-orang kristiani yang tangguh, dapat dipercaya, setia, mempunyai dedikasi, yang berjiwa missioner, mampu menjadi garam dan terang masyarakat, melalui pendidikan iman dan kaderisasi.
- f. Membina dan mendampingi keluarga-keluarga agar dapat menjadi dasar atau basis dalam hidup menggereja dan memasyarakat.

5.1.3. Perkembangan Umat di Keuskupan Surabaya

Wilayah Keuskupan Surabaya luasnya 26.461 km persegi meliputi sebagian besar wilayah Jawa Timur dan sebagian wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Blora dan Rembang. Pada tahun 1900 Surabaya memiliki umat sejumlah 3.465, dari jumlah tersebut 2.608 tinggal di kota Surabaya. Dalam perkembangannya sebagai kota dagang dan kota industri banyak pendatang dari tempat atau pulau lain yang tinggal dan bekerja di Surabaya, sehingga menyebabkan Keuskupan Surabaya adalah basis masyarakat kota. Pertumbuhan umat menjadi sangat pesat.

Pertumbuhan umat yang cukup pesat tidak diimbangi dengan jumlah imam yang bekerja sehingga banyak Romo yang harus merangkap pekerjaan. Selain para Romo untuk melakukan pekerjaan pelayanan juga dibantu oleh para pengurus Dewan Paroki, Katekis Sukarela, maupun Asisten Imam.

5.1.4. Karya Keuskupan Surabaya

Keuskupan Surabaya mewujudkan Visi dan Misi yang dimiliki dengan melakukan berbagai karya. Ada beberapa bidang karya yang dilakukan dan dihasilkan oleh Keuskupan Surabaya selama ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Karya Pendidikan

Sudah sejak awal karya pendidikan menjadi perhatian khusus Keuskupan Surabaya. Menurut data tahun 1996 ada 243 sekolah mulai dari TK sampai Universitas. Dari jumlah tersebut 141 ada di bawah Keuskupan Surabaya.

2. Karya Kesehatan

Suster-suster Abdi Roh Kudus (SSps) yang datang pada tahun 1952 merupakan pelopor karya kesehatan dengan mendirikan rumah sakit RKZ. Karya ini semakin berkembang dengan didirikan balai pengobatan, rumah sakit bersalin, dan sebagainya. Saat sekarang ada 27 balai pengobatan, 10 rumah sakit bersalin, 4 rumah sakit umum di bawah Keuskupan Surabaya.

3. Karya Sosial

Karya sosial baik yang karitatif maupun ekonomis yang merupakan kepedulian umat kepada mereka yang kecil dan menderita, sesuai dengan visi Keuskupan Surabaya, selain melalui karya kesehatan, seperti yang telah diungkapkan terungkap melalui berbagai karya kongkret seperti panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain.

4. Pastoral Pendampingan Buruh

Karena Surabaya merupakan kota industri maka banyak kaum buruh dari luar kota yang tinggal dan bekerja di Surabaya. Banyak diantara mereka yang beragama Katolik dan memerlukan pendampingan khusus sebab irama kerja mereka lain dari pekerja biasa. Maka sebagai tanda perhatian khusus Keuskupan Surabaya terhadap masalah ini, pada tanggal 27 Oktober 1998 diresmikan Pastoral Pendampingan Buruh Keuskupan Surabaya (PPB-KS).

5. Forum Persaudaraan Sejati

Forum Persaudaraan Sejati dibentuk akibat peristiwa Situbondo yang terjadi 10 Oktober 1996. Forum Persaudaraan Sejati dibentuk untuk menghimbau agar umat Katolik Keuskupan Surabaya semakin menyadari bahwa mereka

tidak hanya hidup berdampingan tetapi juga harus menganggap umat lain sebagai saudara mereka dalam pengembaraan di dunia sebagai musafir menuju rumah Bapa.

6. Karya Retret dan Pembinaan

Meningkatnya jumlah umat dan pentingnya pendampingan iman agar iman para umat makin mendalam, dilakukan retret dan pembinaan. Di wilayah Keuskupan Surabaya saat ini sudah ada delapan rumah retret.

7. Karya Peziarahan

Umat adalah musafir yang berziarah di dunia ini maka harus peka melihat tanda-tanda jaman, demikian diungkapkan dalam Visi Keuskupan Surabaya. Peziarahan dan devosi kepada Bunda Maria merupakan devosi yang disukai umat di Keuskupan Surabaya. Tergerak adanya keadaan ini, maka Keuskupan Katolik menyediakan karya peziarahan misalnya pembangunan Gua Maria di Puh Sarang.

8. Karya di Bidang Komunikasi Sosial

Karya komunikasi merupakan karya penting di jaman modern ini. Karya ini berupa terbitnya tabloid maupun siara radio. Karya komunikasi yang ada adalah Tabloid Yubelium dan pengisian lewat mimbar Radio Salvatore serta permintaan dari stasiun televisi.

5.1.5. Prinsip-Prinsip Dasar Kegiatan di Keuskupan Surabaya

Beberapa hal yang menjadi prinsip-prinsip dasar kegiatan di Keuskupan Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dasar menggereja sebagai suatu keuskupan

Kita sadar bahwa kita semua adalah bagian-bagian dari suatu keuskupan yang sama. Tidak ada bagian atau unit yang boleh memisahkan diri dari keuskupan dan tidak mendukung kebersamaan sebagai suatu keuskupan.

2. Bertanggung jawab

Gereja Katolik sadar bahwa pertanggungjawaban dalam keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Gereja Katolik kepada Tuhan dan kepada umat. Gereja Katolik akan terbuka dan bersedia memberikan pertanggungjawaban dalam hal keuangan secara teratur dan jujur.

3. Berdikari

Setiap paroki diharapkan sedapat mungkin berdikari dalam arti mengandalkan dukungan umat setempat di mana paroki tersebut berdiri. Prinsip ini mengajarkan kepada paroki untuk berkeaktivitas guna mengembangkan paroki masing-masing.

4. Subsidiaritas

Hal-hal yang dapat ditangani paroki, diharapkan diselesaikan sendiri lebih dahulu. Kalau paroki tidak dapat berdikari sepenuhnya, maka instansi yang lebih tinggi membantunya. Prinsip ini mendasarkan bahwa bila memang dipandang tidak mampu akan diberikan bantuan subsidiaritas.

5. Solidaritas

Paroki-paroki saling memperhatikan, membantu dan menolong. Paroki yang mempunyai kelebihan dana diharapkan rela memberikan dana solidaritas keuskupan lebih banyak, untuk membantu yang lain.

6. Kesederhanaan dan Penghematan

Dilakukan dengan menghindari pola hidup mewah, keserakahan dan penumpukkan harta, dengan mengusahakan, memakai atau memiliki harta dan fasilitas yang berlebihan.

7. Prioritas pada yang Terlupakan dan Menderita

Mengusahakan terciptanya tatanan hidup demi kesejahteraan semua orang dengan mengutamakan saudara-saudara yang terlupakan dan menderita dalam konteks pembangunan jemaat dan masyarakat.

5.2. Analisis dan Pembahasan

5.2.1. Akuntansi dalam Konteks Organisasi Gereja Katolik

Beberapa tahun yang lalu, akuntansi secara tradisional telah dipahami sebagai suatu prosedur rasional yang digunakan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan pengendalian. Dalam pengertian yang demikian, akuntansi tampak seperti teknologi yang kelihatan konkrit, tampak, dan bebas dari nilai masyarakat (*value-free*) di mana akuntansi dipraktikkan. Semakin berkembangnya tentang penelitian akuntansi dalam upaya untuk melakukan pemahaman terhadap ilmu akuntansi lebih lanjut, menyebabkan akuntansi memiliki pemahaman dan pengertian yang lebih luas, misalnya dalam konteks sosial dan organisasi. Akuntansi mulai dipahami sebagai bentuk yang dinamis dan berubah-ubah serta selalu berkembang. Dengan kata lain, akuntansi bukanlah suatu hal yang statis atau selalu tetap tanpa ada perubahan yang berjalan di masyarakat, tetapi dapat dipandang sebagai suatu bentuk yang selalu berubah di

setiap waktu serta bergantung pada lingkungan di mana akuntansi ada dan dipraktikkan.

Pada tingkat mikro (organisasi), akuntansi telah berubah sesuai dengan arah dan pengaruh lingkungan organisasi, seperti restrukturisasi dan perbaikan organisasi, tugas-tugas organisasi, strategi struktur dan pendekatan dalam pembagian kerja, teknologi dan praktik, serta konflik sosial dalam organisasi. Di samping mengalami perubahan-perubahan seperti tersebut di atas, akuntansi tidak begitu saja eksis dibentuk oleh lingkungannya, tetapi akuntansi juga aktif untuk menebarkan kekuatan atau pengaruh potensial untuk membentuk lingkungan serta realitas di mana akuntansi ada dan dipraktikkan. Akuntansi dalam dunia nyata telah membantu manajemen dan pihak lainnya dalam organisasi untuk melihat secara jelas fenomena konseptual dan abstrak yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Melihat besar pengaruh akuntansi dalam membentuk realitas membuat akuntan untuk tidak melihat dirinya secara pasif dengan hanya mempraktikkan bentuk teknik akuntansi, tetapi hendaknya akuntan menganggap dirinya sebagai agen yang merupakan bagian dari suatu proses pembentukan realitas sosial sesuai dengan tempat di mana akuntan berada dan bekerja.

Bertolak dari pemikiran yang telah dijabarkan di atas, akhir-akhir ini bermunculan pengembangan akuntansi yang disesuaikan dengan tempat akuntansi tersebut dipraktikkan pada suatu organisasi. Salah satu bentuk pengembangan akuntansi yang disesuaikan dengan organisasi tempat akuntansi berada adalah akuntansi gereja. Laughlin (1990:94) sebagai contoh, dengan menggunakan teori Gidden tentang *structuration theory*, mencoba mengetahui praktik akuntabilitas

keuangan (hubungan antara prinsipal dan agen) di Gereja Inggris dalam konteks organisasi. Laughlin beranggapan bahwa teori tersebut sebagai dedikasi untuk memahami perilaku manusia dalam situasi tertentu dalam mempertahankan suatu keyakinan bahwa semua aksi dan interaksi memiliki suatu pola yang disebut struktur. Berdasarkan pemahaman ini, Laughlin mencoba untuk menangkap bahwa praktik akuntabilitas keuangan di Gereja Inggris sebagai cara untuk memberikan isi pada struktur teori akuntansi.

Pemaparan yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntansi memiliki lingkup yang luas. Di mana akuntansi berada, akuntansi memiliki kekuatan untuk merubah bentuk sesuai dengan tempat atau organisasi yang mempraktikkan kegiatan akuntansi. Di Gereja Katolik juga terjadi hal yang sama, akuntansi yang dipraktikkan di Gereja Katolik adalah akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik, dalam arti sesuai dengan ajaran serta struktur organisasi yang ada pada Gereja Katolik.

5.2.1. Deskripsi Kegiatan Akuntansi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya

Penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik Keuskupan Surabaya yang selama ini sudah ada sangat sederhana sekali. Kegiatan tersebut hanya meliputi pencatatan secara sederhana meliputi laporan tentang penerimaan dan pengeluaran saja, yang mana bentuknya seperti pada lampiran 2. Pada lampiran tersebut hanya menyediakan laporan tentang berapa jumlah penerimaan dan berapa jumlah pengeluaran dalam periode tertentu tanpa ada perincian lebih lanjut sehingga mendatangkan kesulitan untuk melakukan analisis terutama guna menilai

kemampuan pengelola keuangan Gereja Katolik untuk mengembangkan sumber daya keuangan yang dimiliki guna mencapai visi dan misi Gereja Katolik. Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Surabaya yang diterbitkan per 1 Januari 2000 menyatakan bahwa seharusnya Gereja Katolik membuat laporan akuntansi tahunan yang memuat tentang: neraca atau arus kas dengan penjelasan-penjelasan, daftar inventaris, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja paroki.

Penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik beserta penetapan standar yang ditetapkan berada di bawah tanggung jawab Dewan Keuangan. Boylon (2003:194) menyatakan bahwa Dewan Keuangan adalah suatu dewan yang menurut hukum sebaiknya ada, untuk menangani kebijakan keuangan suatu keuskupan. Dewan Keuangan diketuai oleh Uskup sendiri. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya manusia akan pemahaman terhadap bidang akuntansi maka Dewan Keuangan belum dapat menetapkan kerangka akuntansi yang ideal sebagai standar penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik, bahkan bentuk laporan akuntansi yang diinginkan pada Pedoman Keuangan Paroki Keuskupan Surabaya juga belum dapat terealisasi.

Akuntansi Gereja Katolik di Keuskupan Surabaya, sebenarnya dapat dikembangkan dari Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia guna mempermudah proses penyelenggaraannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada pada APB (*Accounting Principles Board*) No 4. APB No 4 berusaha untuk menyediakan suatu struktur yang dapat digunakan sebagai pendekatan penyelesaian beberapa masalah praktik akuntansi yang terkadang belum ada pada

standar akuntansi dan seringkali menimbulkan berbagai kesulitan dengan mengembangkan standar yang sudah ada. Pada Gereja Katolik, APB No 4 dapat digunakan sebagai pedoman pengembangan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi melalui pendekatan APB No 4 ini dapat dikembangkan bentuk kerangka akuntansi yang ideal untuk diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik.

5.2.3. Karakteristik Gereja Katolik terkait dengan Akuntansi

Pemahaman terhadap karakteristik Gereja Katolik sangat dibutuhkan terlebih dahulu sebelum membuat kerangka akuntansi Gereja Katolik yang ideal sebagai standar penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik. Gereja Katolik menggunakan Alkitab sebagai dasar pengajaran. Hal ini disebabkan karena Alkitab adalah panduan dari umat Gereja Katolik yang telah diyakini kebenarannya. Tujuan utama penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik adalah sebagai alat pertanggungjawaban pengurus Gereja Katolik terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Terkait dengan hal pertanggungjawaban dalam Alkitab, ada beberapa hal yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. *Lukas 16:1-2*

Dan Yesus berkata kepada murid-Nya: “Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. kepadanya disampaikan tuduhan, bahwa bendahara itu yang menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya: Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggung jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara”.

Lukas mengajarkan adanya pertanggungjawaban harus dilakukan oleh setiap orang yang bekerja. Pertanggungjawaban disebabkan oleh setiap perbuatan yang dilakukan. Pada perumpamaan tentang bendahara, bendahara yang tidak dapat menunjukkan pertanggungjawaban tidak akan dipakai lagi untuk hubungan kerja dengan tuannya.

2. *1 Petrus 3: 15-17*

Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedia pada segala waktu untuk memberikan pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.

Petrus mengajarkan bahwa pertanggungjawaban terhadap tiap orang akan membuat hidup menjadi saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Pertanggungjawaban terhadap sesama, secara tidak langsung melakukan pertanggungjawaban terhadap Tuhan, karena melakukan hal yang baik dan berkenan serta dikehendaki oleh Tuhan.

3. *Ibrani 13:17*

Taatilah pimpinan-pimpinanmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.

Ibrani mengajarkan bahwa pertanggungjawaban adalah bentuk ketaatan kepada pimpinan. Gereja Katolik mengajarkan ketaatan kepada pimpinan, karena pimpinan adalah orang atau pihak yang dipercaya untuk menjaga serta memelihara bawahan.

Dari ketiga dasar ajaran tentang pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Gereja Katolik, sangat mutlak bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan Gereja Katolik untuk memperhatikan masalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang tampak, yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama dengan apapun bentuknya berarti pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban yang tidak tampak, yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan terhadap Tuhan yang ada dalam bentuk tanggung jawab moral berupa kejujuran pelaporan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan yang benar.

5.2.4. Akuntansi sebagai Alat Pertanggungjawaban pada Gereja Katolik

Prinsip-prinsip dasar Gereja Katolik juga menegaskan bahwa Gereja Katolik harus melakukan pertanggungjawaban dalam keuangan karena hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Gereja Katolik kepada Tuhan dan kepada umat. Gereja Katolik akan terbuka dan bersedia memberikan pertanggungjawaban dalam hal keuangan secara teratur dan jujur. Dari penegasan ini terlihat bahwa Gereja Katolik butuh sarana untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan ini sebab melalui kegiatan akuntansi. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh APB No 4 yang menyatakan bahwa tujuan informasi akuntansi keuangan diarahkan untuk memenuhi tujuan pemakai secara umum dan khusus. Informasi untuk memenuhi tujuan umum disajikan dalam laporan untuk tujuan umum atas posisi dan kemajuan organisasi seperti neraca dan laba rugi. Sedangkan informasi untuk

memenuhi tujuan khusus dihasilkan dari catatan akuntansi yang bentuk laporannya dirancang secara khusus. Pemakaian penerapan tujuan informasi akuntansi menurut APB No 4 dalam penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik adalah menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (dalam hal ini pengelola Gereja Katolik), atau sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai informasi akuntansi Gereja Katolik ingin menilai apa yang telah dilakukan serta sejauh mana pengelola sumber daya Gereja Katolik (khususnya sumber daya keuangan) bertanggung jawab atas upaya pengelolaan yang dilakukan. Penilaian tersebut akan menghasilkan keputusan-keputusan bagi pemakai, yang umumnya mencakup keputusan untuk mengangkat atau mengganti pengelola Gereja Katolik bila dianggap tidak dapat bertanggung jawab dengan baik atau tidak lagi bersedia menjadi donatur pada Gereja Katolik yang bersangkutan.

Pembentukan Gereja Katolik dapat digambarkan seperti adanya *nexus contract* dalam *agency theory* (teori keagenan). Teori keagenan menyatakan bahwa dalam suatu organisasi tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan pihak-pihak lain untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu suatu organisasi harus mengadakan kontrak atau kerja sama dengan pihak-pihak lain yang mana, kumpulan kontrak tersebut dikenal dengan istilah *nexus contract*. Pada teori keagenan, ada satu pihak yang memiliki posisi sebagai prinsipal atau pihak yang memberikan kepercayaan, di pihak lain ada satu pihak yang memiliki posisi sebagai agen atau pihak yang diberi kepercayaan untuk melakukan suatu tugas. Agen harus bertanggung jawab kepada prinsipal, di mana salah satu bentuk

tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah melalui akuntansi. Hal ini seperti yang dijabarkan oleh Scott (1997:219) yang menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dipandang sebagai sekumpulan kontrak (*nexus contract*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Organisasi tidak dapat menjalankan usahanya sendiri untuk mengoperasikan dan mengembangkan usahanya. Organisasi harus menjalankan kerja sama dengan pihak lain. Ketidakmampuan perusahaan mengoperasikan dan mengembangkan usahanya sendiri melahirkan adanya *agency theory* atau teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara dua pihak di mana satu pihak berada sebagai prinsipal dan pihak lainnya berada di pihak agen. Surifah (1999:72) menyatakan bahwa dalam teori agensi terjadi hubungan peragenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih personal (prinsipal) menyewa atau mengikutsertakan personal lainnya (agen) untuk menjalankan tugas atas kepentingan prinsipal termasuk wewenang dalam pengambilan suatu keputusan. Jika masing-masing kelompok yang berhubungan memaksimalkan utilitinya maka sangat beralasan jika agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Prinsipal dapat membatasi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen ini, dengan menentukan insentif atau gaji yang tepat terhadap agen dan mengadakan monitoring atau pengawasan untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang. Teori agensi perusahaan dapat digambarkan sebagai lokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen organisasi (agen) dan berusaha memberi suatu pemahaman perilaku organisasional dengan mengungkapkan bagaimana

pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan utiliti atau kepentingannya.

Pada organisasi Gereja Katolik di Keuskupan Surabaya, ada beberapa bentuk kontrak yang dapat dijabarkan sesuai dengan tinjauan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Penjabaran beberapa bentuk kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gereja Katolik (para anggota struktural Gereja Katolik) dengan Tuhan.

Bentuk kontrak ini merupakan lanjutan dari sejarah pembentukan Gereja Katolik. Pada awalnya, Gereja Katolik dibentuk oleh Yesus sendiri dan diteruskan oleh para para rasul-rasul-Nya. Kegiatan pengembangan Gereja Katolik ini semakin berkembang sehingga pada akhirnya banyak anggota yang tergabung menjadi anggota struktural Gereja Katolik yang pada akhirnya menjadikan anggota struktural Gereja Katolik sebagai agen yang harus bertanggung jawab kepada Kristus (Tuhan) sebagai prinsipal, termasuk pertanggungjawaban keuangan yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan akuntansi. Hal ini diwujudkan dengan adanya pengiriman laporan keuangan hasil dari kegiatan akuntansi di Gereja Katolik ke Paus di Roma, yang ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik serta merupakan bentuk perwakilan dari Tuhan Yesus sendiri. Kegiatan ini juga sesuai dengan dasar ajaran pertanggungjawaban yang terdapat pada *Ibrani 13:17* bahwa bertanggung jawab juga merupakan bentuk ketaatan terhadap pimpinan. Pengiriman laporan keuangan oleh Gereja Katolik ke Paus yang

di Roma adalah bentuk pemenuhan tanggung jawab, yang menunjukkan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Surabaya taat kepada pimpinan.

2. Gereja Katolik (para anggota struktural Gereja Katolik) dengan umat dan donatur.

Bentuk kontrak ini memposisikan para anggota struktural Gereja Katolik sebagai agen sedangkan umat dan donatur sebagai prinsipal. Pada hubungan ini, para anggota struktural Gereja Katolik harus bertanggung jawab kepada umat dan donatur termasuk tanggung jawab keuangan. Hal ini, terkadang bila dipikirkan lebih jauh terkadang akan menghasilkan pendapat sesuatu hal yang tidak diperlukan. Para umat dan donatur memberikan persembahan kepada Gereja Katolik didasarkan atas sifat ikhlas dan tidak perlu tahu ke mana persembahan tersebut akan digunakan karena dasar keikhlasan. Akan tetapi, bagi Gereja Katolik kegiatan untuk bertanggung jawab atas penggunaan persembahan dari umat dan donatur tetap diperlukan sehingga Gereja Katolik perlu menyelenggarakan kegiatan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan kepada umat dan donatur bagaimana Gereja Katolik mengelola dan menggunakan persembahan umat untuk menunjukkan kinerja mereka dalam bekerja. Selain itu, sesuai dengan dasar pertanggungjawaban yang dipakai dari *Lukas 16:1-2*, bahwa pihak-pihak yang tidak dapat bertanggung jawab dengan baik tidak dapat dipakai sebagai pekerja sehingga melalui pertanggungjawaban keuangan melalui kegiatan akuntansi dapat disimpulkan apakah para

anggota struktural Gereja Katolik telah bekerja dengan baik atau tidak sehingga layak dipertahankan atau tidak untuk diberi kepercayaan.

Hal yang ada juga sesuai dengan teori yang terkandung dalam akuntansi sendiri yaitu teori normatif yang menyatakan bahwa sudah seharusnya agen bertanggung jawab kepada prinsipal sehingga sudah seharusnya pula para anggota struktural Gereja Katolik untuk bertanggung jawab kepada umat dan donatur termasuk pertanggungjawaban keuangan meskipun bila dipikir lebih lanjut, terkadang menghasilkan pemikiran bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Scott (1997:221) menyatakan bahwa teori normatif adalah teori yang menjabarkan perilaku yang seharusnya untuk dilakukan oleh anggota organisasi yang terlibat dalam *nexus contract*. Teori normatif bila dihubungkan dengan dasar ajaran Gereja Katolik tentang pertanggungjawaban sesuai dengan *1 Petrus 3:15-17* bahwa dalam hati seseorang bila dia tidak dapat bertanggung jawab dengan baik tidak akan mendapatkan ketenangan sebab dengan adanya bertanggung jawab terhadap sesama (dalam hal ini umat dan donatur) merupakan bukti bahwa orang tersebut (para anggota struktural Gereja Katolik) juga bertanggung jawab kepada Tuhan.

3. Gereja Katolik (para anggota struktural Gereja Katolik) dengan pemerintah. Gereja Katolik yang berdiri di suatu tempat harus mendapatkan izin dari pemerintah termasuk Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. Terkait dengan masalah pemerintah, Gereja Katolik, yaitu para pegawainya merupakan obyek pajak sehingga membayar pajak adalah kewajiban yang harus

dipertanggung jawabkan oleh Gereja Katolik. Akuntansi akan berguna sebagai alat pertanggungjawaban Gereja Katolik untuk memberikan informasi berapa pajak penghasilan para pegawai yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Pada bentuk kontrak ini, meskipun Paus di Roma adalah pimpinan yang tertinggi dari Gereja Katolik, tetapi Gereja Katolik juga harus taat terhadap pimpinan pemerintah di mana Gereja Katolik berada sehingga harus bertanggung jawab kepada pemerintah setempat termasuk dengan penyelenggaraan akuntansi untuk dasar perhitungan pajak penghasilan pegawai yang harus dibayarkan. Hal ini sesuai dengan dasar ajaran Gereja Katolik tentang pertanggungjawaban, yaitu pada:

- a. *Ibrani 13:17* yang mengajarkan agar umat Gereja Katolik taat kepada pimpinan yang ada.
 - b. *Matius 22:17-22* tentang perikop pembayar pajak kepada kaisar, di mana merupakan bentuk ajaran agar bertanggung jawab untuk memberikan hak kaisar (pemerintah) dan hak Tuhan.
4. Gereja Katolik (para anggota struktural Gereja Katolik) dengan masyarakat lain yang terkait dengan Gereja Katolik.

Masyarakat lain yang dimaksud di sini adalah para orang-orang yang menderita, fakir miskin, orang yang berkekurangan, kelompok orang yang tidak mampu dan sebagainya (kelompok hina papa), yang perlu untuk mendapatkan bantuan dan perhatian. Kelompok ini terkait dengan tanggung jawab Gereja Katolik untuk memberikan perhatian terhadap kelompok hina papa. Dasar alkitab bahwa Gereja Katolik harus memperhatikan kelompok

ini adalah *Matius 25:40*, yang menyatakan: Dan raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraKu yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk Aku.

Ayat ini menyatakan bahwa perbuatan baik yang ditujukan untuk orang yang hina berarti ditujukan untuk Yesus (Tuhan). Sehingga melakukan perbuatan baik terhadap sesama manusia yang berada dalam kelompok hina papa berarti melakukan untuk Yesus sehingga ayat ini juga sesuai dengan *1 Petrus 3:15-17* adanya tanggung jawab terhadap sesama manusia berarti juga bertanggung jawab terhadap Tuhan. Di Keuskupan Surabaya tanggung jawab ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip dasar yaitu mengusahakan terciptanya tatanan hidup demi kesejahteraan semua orang dengan mengutamakan saudara-saudara yang terlupakan dan menderita dalam konteks pembangunan jemaat dan masyarakat.

Akuntansi Gereja Katolik akan membantu menunjukkan pada pihak yang membutuhkan sejauh mana Gereja Katolik telah bertanggung jawab terhadap kelompok ini dengan memberikan laporan keuangan mengenai penggunaan sumber daya keuangan Gereja Katolik yang seharusnya diperuntukkan oleh kaum hina papa untuk perbaikan kesejahteraan hidup mereka.

Dari penjabaran di atas dapat dipahami bahwa akuntansi dalam Gereja Katolik memiliki dua arah pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab terhadap sesama atau tanggung jawab searah (horisontal) dan tanggung jawab terhadap

Tuhan yang diwakili oleh Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik (vertikal). Penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik untuk alat pertanggungjawaban terhadap sesama dapat diterima secara umum seperti halnya penggunaan akuntansi pada umumnya di luar konteks Gereja Katolik. Sedangkan penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik sebagai alat pertanggungjawaban terhadap Tuhan masih terasa asing. Akan tetapi, bila ditilik dari sejarah akuntansi, sebenarnya, awal akuntansi ada merupakan alat pertanggungjawaban kepada Tuhan. Salah satu tokoh Gereja Katolik yaitu Luca Pacioli (seorang pastur) yang juga merupakan tokoh akuntansi, menulis sebuah buku matematika yang berjudul *Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita*. Salah satu bagian buku tersebut membahas tentang akuntansi berpasangan (*double entry bookkeeping*) yang digunakan sampai sekarang. Salah satu hal lain yang menarik dari buku ini adalah nilai religiusitas yang selalu menyebut nama Tuhan ketika membahas akuntansi. Pembahasan tersebut adalah:

“... but if one of the said sum total exceed the other it will denote that there is an error in your ledger which, with diligent, it will be best for you to find with the ability of the intellect God has given you, and with the artifice of reason which you will have learnt well, and which, as we said in the commencement is extremely necessary to the good merchant; otherwise not being a good accountant in your affair, you will feel your way forward like a blind person, and much loss can arise there from...”.

Melalui kegiatan akuntansi, pencatatan terhadap kekayaan organisasi akan sangat jelas. Sebagai orang yang beragama kuat, Pacioli ingin memberikan gambaran bahwa setiap tugas harus dijalankan dengan baik, sehingga bila suatu organisasi tidak dapat mencatat kekayaan dengan baik, maka sangat mungkin menyalahi ajaran agama (tidak bertanggung jawab kepada Tuhan).

5.3. Kerangka Konseptual Akuntansi Gereja Katolik

5.3.1. Kebutuhan akan Kerangka Konseptual Akuntansi Gereja Katolik

Kerangka konseptual merupakan suatu pernyataan prinsip teoritikal yang diterima umum dan digunakan sebagai kerangka acuan untuk suatu bidang tertentu. Dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan prinsip teoritikal ini akan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi praktik pelaporan keuangan yang sedang berlangsung, namun praktik pelaporan keuangan yang sedang dikembangkan. Kerangka dasar ini harus menyediakan prinsip teoritikal dalam menentukan pertanggungjawaban atas peristiwa-peristiwa ekonomi tersebut serta bagaimana harus mengkomunikasikannya kepada pemakai. Hal ini ditegaskan oleh Belkaoui (2000:124) yang menyatakan bahwa kerangka konseptual berguna sebagai acuan yang menjadi dasar pengembangan teknik-teknik akuntansi. Kerangka konseptual merupakan hasil pemikiran yang mendalam serta mempunyai implikasi yang luas, karena kerangka konseptual dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor nilai-nilai dan lingkungan yang ada di suatu negara dalam wilayah luas dan organisasi dalam wilayah yang lebih sempit.

Pada lingkungan Gereja Katolik, diharapkan kerangka konseptual yang dihasilkan sesuai dengan tatanan nilai dan lingkungan Gereja Katolik. Kemampuan untuk menghasilkan kerangka konseptual akuntansi sesuai dengan tatanan nilai dan lingkungan Gereja Katolik diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk membentuk prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku bagi Gereja Katolik. Adanya penetapan prinsip-prinsip yang ada akan membantu Gereja Katolik untuk menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan tujuannya.

5.3.2. Kerangka Konseptual yang Ideal bagi Akuntansi Gereja Katolik

Kerangka konseptual sebagai dasar pelaksanaan kegiatan akuntansi untuk menghasilkan pelaporan keuangan umumnya terdiri dari: tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi keuangan, elemen laporan keuangan, serta penilaian dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang dihasilkan diharapkan adalah pelaporan keuangan yang wajar, yaitu bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, serta informasinya lengkap. Keadaan ini menunjukkan bahwa akuntansi dengan berbagai instrumen dan sifat-sifatnya merasa tidak mampu menjamin kebenaran dari hasil laporan keuangan, tetapi hasil tersebut adalah hasil yang wajar.

Hasil kegiatan akuntansi Gereja Katolik yang diharapkan adalah pelaporan keuangan yang benar, yaitu: bebas dari unsur penipuan (jujur) dan tidak memihak pada kelompok tertentu (netral). Belkaoui (2000:202) menyatakan bahwa kejujuran dalam akuntansi berarti melakukan pengukuran dan pelaporan informasi dengan cara yang obyektif dan netral. Yang dimaksud dengan cara yang obyektif dan netral adalah melakukan pengukuran dan pelaporan informasi apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada dan tidak ada indikasi untuk menguntungkan suatu pihak dengan cara merugikan pihak lain. Ikatan Akuntan Indonesia (2002) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi misalnya neraca harus

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas organisasi pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan, sedangkan mengenai netralitas dinyatakan bahwa informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

Berdasarkan hasil yang diharapkan dari kegiatan akuntansi Gereja Katolik, maka kerangka akuntansi Gereja Katolik yang ideal adalah kerangka yang dirumuskan dengan prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebenaran dan keadilan dalam Gereja Katolik dengan bersumber pada Alkitab, berdasarkan pada *Efesus 6:14*, yang menyatakan: Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangan kebenaran dan berbajuzirahkan keadilan. Dalam ayat tersebut dapat diterangkan sebagai umat Gereja Katolik dalam melakukan perbuatan hendaknya merupakan perbuatan yang benar dan adil bagi semua orang di sekitarnya.

Ayat lain yang mendukung mengenai ajaran keadilan adalah *Imamat 19:35-36*, yang menyatakan: Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efa yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai; Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu ke tanah Mesir.

Pada ayat tersebut diajarkan kepada umat Gereja Katolik untuk berbuat adil dan tidak memihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Dengan berbuat adil berarti mentaati perintah Tuhan Allah.

5.3.3. Tujuan Pelaporan Keuangan Gereja Katolik

Penentuan tujuan, merupakan bagian terpenting dalam menyusun kerangka konseptual. Dalam menetapkan tujuan pelaporan keuangan, tujuan ekonomis dan sosial suatu negara merupakan salah satu bahan pertimbangan, sebab akuntansi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomis suatu negara. Tujuan dari pelaporan keuangan menurut APB No 4 terdiri dari:

1. Tujuan dasar, yaitu menyiapkan informasi keuangan organisasi untuk pengambilan keputusan ekonomi.
2. Tujuan umum, yaitu menentukan isi yang tepat (layak) dari informasi akuntansi sehingga dari informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Tujuan kualitatif, yaitu relevan dengan keadaan yang ada, dapat diuji, dimengerti, dan dibandingkan, tidak memihak, serta lengkap.

Tujuan dari pelaporan keuangan di atas, ditentukan dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor lingkungan antara lain, sistem perekonomian, sistem transaksi yang dilakukan, penghargaan terhadap prestasi individual, pemisahan yang tegas antara pemilikan dan manajemen serta sistem birokrasi yang mantap serta syarat-syarat untuk membentuk pelaporan yang berguna sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Pada konteks akuntansi Gereja Katolik, maka tujuan pelaporan keuangan yang dihasilkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Akuntabilitas merupakan pencerminan dari unsur spiritualisasi mengenai pertanggungjawaban, dalam hal ini

mengenai bagaimana sumber daya keuangan Gereja Katolik didapat dan digunakan. Sesuai dengan bagian sebelumnya, tujuan akuntabilitas digunakan untuk pertanggungjawaban secara vertikal yaitu kepada Tuhan dan horisontal yaitu kepada umat manusia (umat dan donatur, pemerintah, serta masyarakat lain yang terkait dengan Gereja Katolik. Pada akuntabilitas, nilai yang terpenting sebagai unsur spritualitas adalah nilai kejujuran. Gereja Katolik harus jujur untuk melaporkan bagaimana sumber daya keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

2. Informasi. Sebagai informasi, pelaporan keuangan dalam Gereja Katolik diharapkan mampu menjadi dasar pembuatan keputusan untuk pengelolaan Gereja Katolik. Selain itu, diharapkan pelaporan keuangan pada Gereja Katolik dapat dijadikan dasar penilaian terhadap kerja anggota struktural anggota Gereja Katolik dalam pengembangan karya mereka ditinjau dari sudut penggunaan keuangan. *Imamat 27:2* menyatakan: “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seseorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku”.

Pelaporan keuangan diharapkan dapat berguna sebagai dasar yang berlaku untuk menilai bagaimana kerja anggota struktural Gereja Katolik terkait dengan masalah keuangan sehingga dengan pelaporan keuangan, penilaian memiliki rambu-rambu yang jelas. Dari penilaian ini akan tampak bagaimana kemampuan anggota struktural Gereja Katolik dalam upaya mengembangkan kegiatan Gereja Katolik melalui penggunaan sumber daya

keuangan yang dimiliki dalam menghasilkan karya-karya penyelamatan sesuai dengan tujuan Gereja Katolik didirikan.

5.3.4. Karakteristik Kualitatif Akuntansi Gereja Katolik

Karakteristik kualitatif akuntansi Gereja Katolik harus memenuhi nilai relevan dan reliabel. Nilai relevan dan reliabel merupakan batasan untuk menentukan arti penting suatu kejadian yang harus dilaporkan. Informasi pelaporan keuangan Gereja Katolik dikatakan relevan bila informasi tersebut disajikan tepat waktu, dapat digunakan untuk prediksi masa yang akan datang khususnya kegiatan yang akan memberikan perkembangan karya Gereja Katolik dengan disesuaikan kekuatan sumber daya yang dimiliki serta dapat digunakan sebagai evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan.

Informasi pelaporan keuangan Gereja Katolik dikatakan reliabel bila bebas dari kesalahan (menyajikan yang sebenarnya) serta mampu memenuhi konsep *verifiability*, *neutrality*, dan *representational faithfulness*. *Verifiability* dimaksudkan bahwa informasi yang dihasilkan menggunakan metode tanpa kesalahan. Sedangkan *neutrality* dihubungkan dengan kepatuhan akuntansi Gereja Katolik pada konsep relevan dan reliabel sehingga tidak memihak untuk kepentingan tertentu. *Representational faithfulness* dimaksudkan agar pelaporan keuangan Gereja Katolik seperti keadaan yang ada (apa adanya).

Melalui penjabaran di atas, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual untuk akuntansi Gereja Katolik mengenai bagian karakteristik kualitatif akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Informasi akuntansi Gereja Katolik harus menyajikan secara benar transaksi-transaksi yang merubah *assets*, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pelaporan keuangan.
2. Informasi akuntansi Gereja Katolik harus bersifat jujur, melaporkan fakta keuangan yang ada sehingga jika ada transaksi yang menyimpang dapat dinilai.
3. Informasi akuntansi Gereja Katolik harus bersifat adil, artinya penyajiannya telah mempertimbangkan antara cara yang adil dan cara yang tidak adil, sehingga pemilihan metode, teknik dan konsep akuntansi Gereja Katolik harus didasarkan pada konsep keadilan untuk seluruh pemakai informasi.

5.3.5. Elemen Laporan Keuangan Gereja Katolik

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun elemen laporan keuangan pada Gereja Katolik sebagai organisasi nirlaba adalah pendekatan yang terdapat pada SFAC No 6, yang menyatakan bahwa hal yang membedakan organisasi yang berorientasi pada laba dengan organisasi yang tidak berorientasi pada laba (nirlaba) adalah sifat operasi. Organisasi nirlaba tidak berfokus pada laporan laba sehingga tidak dilakukan perhitungan terhadap selisih pendapatan dan beban akan tetapi dilaporkan sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran merupakan peningkatan terhadap aktiva bersih (aktiva-hutang) organisasi.

Akuntansi pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya adalah proses mengidentifikasi, menganalisa, mengelompokkan dan melaporkan informasi

keuangan untuk pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Tujuan utama penyelenggaraan akuntansi adalah menyajikan informasi keuangan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja kegiatan pelayanan serta perubahan posisi keuangan keuskupan yang bermanfaat bagi pengurus keuskupan untuk pengambilan keputusan.

Disesuaikan dengan kebutuhannya atau tempat di mana praktik akuntansi digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, maka elemen laporan keuangan Gereja Katolik berbeda dengan elemen laporan keuangan perusahaan atau organisasi pada umumnya. Pada Gereja Katolik, tidak tujuan untuk mencari laba sehingga elemen laporan keuangan yang dimiliki tidak mengandung laporan laba rugi seperti perusahaan pada umumnya. Elemen laporan keuangan pada Gereja Katolik tidak mengandung adanya pendapatan dan beban untuk menghasilkan laba atau rugi, tetapi penerimaan dan pengeluaran.

Akuntansi pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya menghasilkan laporan keuangan yang merupakan laporan mengenai informasi tentang posisi keuangan, penerimaan, dan pengeluaran serta lampiran yang terkait, yang dikonsolidasikan dari semua seksi atau komisi yang ada, kepanitiaan, kepemudaan dan pastoral, yang bermanfaat bagi pengurus keuskupan dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan keuskupan. Laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Penerimaan dan Beban

Laporan penerimaan dan beban menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Gereja Katolik Keuskupan Surabaya selama suatu periode

tertentu, termasuk posisi aktiva bersih (modal) serta informasi tentang penggunaan sumber dana dalam pelaksanaan berbagai kegiatan (lihat di lampiran 3).

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai harta, kewajiban, dan aktiva bersih (modal) Gereja Katolik Keuskupan Surabaya pada saat tertentu (lihat di lampiran 4). Informasi yang disajikan dalam neraca akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kemampuan untuk menilai:

- a. Upaya Gereja Katolik Keuskupan Surabaya dalam rangka memberikan pelayanan secara berkesinambungan.
- b. Likuiditas, yaitu kemampuan Gereja Katolik Keuskupan Surabaya untuk memenuhi kewajibannya.

3. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan dari kegiatan yang dibiayai oleh keuangan dan/atau menggunakan dari sumber lainnya (lihat lampiran 5).

4. Laporan lainnya berupa daftar aktiva tetap atau inventaris

Daftar aktiva tetap atau inventaris adalah laporan yang menyajikan perincian aktiva tetap yang dimiliki, seperti tanah, gedung, kendaraan bermototr, perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, dan lain-lain pada suatu tanggal tertentu (lihat lampiran 6).

Apabila dilakukan analisis perbandingan antara bentuk pelaporan akuntansi Gereja Katolik yang selama ini ada seperti pada lampiran 1 dan yang diusulkan seperti lampiran 3 sampai dengan 6, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Bentuk pelaporan yang lama hanya memberikan laporan pada periode tertentu saja sehingga sangat sulit untuk dibandingkan dengan periode yang lalu, tidak seperti pada bentuk laporan yang diusulkan. Hal ini disebabkan karena bentuk laporan yang diusulkan memiliki kejelasan termasuk surplus atau defisit terhadap penerimaan dan pengeluaran yang diakumulasikan pada periode-periode berikutnya. Akibatnya bentuk pelaporan yang diusulkan lebih memiliki nilai guna serta lebih mampu dibandingkan dalam rangka menilai kinerja pengelola sumber daya keuangan.
2. Bentuk pelaporan yang diusulkan memberikan kelengkapan laporan dengan memberikan laporan bagaimana aktivitas-aktivitas untuk pengembangan Gereja Katolik dilakukan dengan adanya elemen laporan aktivitas dan laporan lainnya yang berupa laporan daftar aktiva tetap atau inventaris.
3. Hendaknya laporan keuangan memiliki kode rekening yang sama untuk rekening yang terdaftar dalam laporan keuangan bagi seluruh Gereja Katolik yang ada, karena laporan keuangan dilaporkan pada Paus. Adanya kode rekening yang sama akan membantu memudahkan proses penggabungan laporan keuangan mulai dari tingkatan terendah yaitu paroki, keuskupan, kardinal, sampai ke Paus sebagai pimpinan tertinggi.

5.3.6. Penilaian dan Pengukuran

Penilaian dan pengukuran elemen laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan untuk mencapai penyediaan informasi yang bermanfaat. Penilaian dan pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus diikatkan pada suatu elemen yang akan dilaporkan. APB No 4 menyatakan bahwa penilaian dan pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang (satuan moneter) untuk menilai dan mengukur sumber daya ekonomi dan kewajiban saat terjadi perubahan. Proses ini menyangkut pada pemilihan dasar penilaian dan pengukuran yang ada. Penilaian dan pengukuran selama ini tidak dilakukan oleh akuntansi Gereja Katolik. Gereja Katolik selama ini hanya menyelenggarakan laporan keuangan tentang besarnya uang yang diterima dan dikeluarkan saja. Sedangkan persembahan yang terkait dengan masalah aktiva hanya diakui dalam daftar investaris saja.

Untuk memenuhi tujuan penyediaan informasi yang bermanfaat terkait dengan masalah penilaian dan pengukuran, maka penilaian dan pengukuran yang dapat ditetapkan mengenai aktiva dalam kerangka konseptual akuntansi Gereja Katolik sesuai dengan APB No 4 adalah sebagai berikut:

1. Aktiva tetap yang diperoleh dari hasil pembelian oleh anggota struktural Gereja Katolik untuk kegiatan pelayanan Gereja Katolik hendaknya dilaporkan sesuai dengan harga perolehannya (*historical cost*). APB No 4 menyatakan bahwa konsep *historical cost* atau biaya historis adalah prinsip pencatatan dengan menggunakan harga perolehan untuk mencatat aktiva maupun kewajiban pada laporan keuangan.

2. Aktiva tetap yang diperoleh dari hasil persembahan umat atau donatur dapat dilaporkan sesuai dengan nilai nominal yang dasar penilaian dan pengukurannya berdasarkan harga pasar saat persembahan yang diserahkan tersebut di jual pada saat yang sama (*current exit value*). APB No 4 menyatakan bahwa *current exit value* adalah suatu konsep akuntansi yang mengukur aset dan kewajiban berdasarkan harga dalam suatu pertukaran apabila penjualan dilakukan di pasar. Jadi untuk aktiva tetap dari hasil persembahan yang dipakai sebagai dasar penilaian dan pengukuran adalah harga pasar seandainya aktiva tersebut dijual pada waktu yang sama dengan saat aktiva tersebut diperoleh dari persembahan.

BAB VI

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik saat ini masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pada penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik belum ada standar yang pasti untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan. Standar Akuntansi Keuangan yang sudah ada tidak dapat digunakan karena dalam transaksi keuangan Gereja Katolik ada beberapa karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut terjadi karena kegiatan operasi Gereja Katolik berdasarkan pada Alkitab sebagai buku pedoman dan sumber ajaran umat Katolik dalam menjalankan kehidupan beragama yang belum tentu memiliki kesamaan pada organisasi lainnya.
2. Hasil penyelenggaraan akuntansi Gereja Katolik berupa pelaporan keuangan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban. Pembentukan Gereja Katolik dapat dipandang sebagai *nexus of contract*, di mana pada Gereja Katolik ada pihak yang berperan untuk diberi tanggung jawab (agen) dan ada pihak yang menerima tanggung jawab (prinsipal). Meninjau kedua teori ini, pengelola Gereja Katolik merupakan agen yang harus bertanggung jawab terhadap prinsipal, yaitu Tuhan dalam bentuk melakukan perbuatan

yang tidak menyalahi ajaran Gereja Katolik, umat dan donatur, pemerintah, serta masyarakat lain yang terkait dengan Gereja Katolik.

3. Untuk melakukan kegiatan akuntansi, Gereja Katolik membutuhkan kerangka konseptual akuntansi yang ideal. Kerangka konseptual akuntansi yang ideal diharapkan dapat menjadi pedoman bagaimana Gereja Katolik harus menyelenggarakan kegiatan akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi yang ideal untuk Gereja Katolik adalah kerangka konseptual akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik (sesuai dengan ajaran yang ada pada Gereja Katolik).

6.2. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan bagi pengembangan akuntansi Gereja Katolik, khususnya yang dilakukan di Keuskupan Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya penyelenggara akuntansi Gereja Katolik melakukan diskusi dengan beberapa pihak ahli akuntansi untuk menentukan kerangka konseptual akuntansi yang ideal untuk digunakan dalam proses akuntansi sehingga dapat diciptakan akuntansi yang sesuai dengan karakteristik dan ajaran Gereja Katolik.
2. Pengelola keuangan Gereja Katolik yaitu Dewan Keuangan hendaknya meningkatkan keahlian dan kemampuan di bidang akuntansi sehingga dapat menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Untuk mempermudah proses penggabungan laporan keuangan sebaiknya dibuat kode rekening yang sama untuk setiap rekening yang ada pada laporan keuangan.
4. Penyusunan kerangka konseptual bagi akuntansi Gereja Katolik untuk menciptakan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik dapat berpedoman pada penggunaan APB NO 4, yang menyatakan bahwa akuntansi tidak bersifat tetap tetapi dinamis dan dapat disesuaikan dengan keperluan yang ada.

6.3. Keterbatasan Penelitian

1. Gereja Katolik bersifat universal dan laporan keuangan yang dihasilkan juga digunakan sebagai alat pertanggungjawaban ke Paus sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik di dunia, sehingga untuk melihat penerapan akuntansi Gereja Katolik lebih lanjut sangat sulit dilakukan karena penelitian harus dilakukan ke Roma sebagai tempat Paus berada.
2. Tinjauan teoritis yang membahas akuntansi Gereja Katolik sangat sulit untuk didapatkan sehingga sumber untuk pembahasan didasarkan pada akuntansi Gereja Kristen yang disesuaikan dengan karakteristik agama Katolik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anthony, R., 1978, *Financial Accounting in Nonbusiness Organization*, Financial Accounting Standard Board, Stamford, CA.
- Armacost, R dan Wayne Schneider, 2000, *Financial Management in Church Operation*, *CPA Journal*, p. 36-41.
- Belkaoui, A.R., 1993, *Accounting Theory*, Hartcourt Brace Javanovich Publisher, London.
- _____, 2000, *Accounting Theory*, Buku Satu, Edisi Terjemahan, Salemba Empat, Jakarta.
- Birkett, W.P. dan W.F. Chua, 1988, *Situating Management Accounting Practice, Proceeding from the Second Interdisciplinary Perspective on Accounting Conference, Manchester*, p. 1-22.
- Blackbeard, Luke, 2003, *Accounting for the Church*, *Accounting 259: Accounting Honours*, Literature Review, p. 1-7.
- Booth, Peter, 1993, *Accounting in Churches: A Research Framework and Agenda*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol 6, No 4, p: 37-67.
- Boyce, L., 1984, *Accounting for Churches*, *Journal of Accountancy*, February, p. 96-102.
- Boylon, John Pr, 2003, *Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.
- Brucket dan Swide, 1988, *Church Accounting: Is There Only One Way?*, *The Woman CPA*, p. 27-31.
- Davis, T, 2001, *Laporan Komite Audit Gereja: Kepada Presidensi Utama Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir*, *The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint*, p. 1-2.
- Depatemen Keuangan Republik Indonesia, 2001, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah*, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, Jakarta.

- Duncan J.Fiesher dan Dale, 1999, **Internal Control Systems in US Churches: An Examination of the Effect of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control**, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 12, Iss. 2, p. 142.
- FASB, 1970, **Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprices**, *APB Statement No 4*, Stamford, Conn:FASB.
- FASB, 1984, **Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprice**, *Statement of Financial Accounting Concept No 5*, Stamford, Conn:FASB.
- FASB, 1985, **A Replacement of FASB Concepts Statement No 3 (Incorporating an Amendement of FASB Concepts Statement No 2)**, *Statement of Financial Accounting Concept No 6*, Stamford, Conn:FASB.
- Fyold, A., 1969, **Management Accounting for Churches**, *Management Accounting*, February, p. 56-59.
- Gray, R., 1996, **Accounting, Financial Reporting and Not for Profit Organization**, *AUTA Review*, Vol 15, No. 1, p. 3-33.
- Hadibroto, S., 1984, **Masalah Akuntansi**, Buku Kesatu, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Sofyan,S., 2002, **Akuntansi Islam**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Harper B dan Harper P, 1988, **Religious Reporting: Is It the Gospe! Thruth?**, *Management Accounting*, February, p. 34-39.
- Heuken, SJ., 1992, **Ensiklopedi Gereja II**, Cipta Loka Caraka, Jakarta.
- _____, 1993, **Ensiklopedi Gereja III**, Cipta Loka Caraka, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, **Standar Akuntansi Keuangan**, Salemba Empat, Jakarta.
- Jumingan, 2003, **Kerangka Kerja Konseptual pada Pelaporan Keuangan**, *Media Akuntansi*, Edisi 34, Juni-Juli: 54-61, Jakarta.
- Kluver, Ron, 2001, **Budgeting in Catholic Parishes**, *Financial, Accountability, and Management Journal*, Feb (17), p. 41-58.
- Komisi Katekik Komisi Wali Gereja Indonesia, 1995, **Pendidikan Agama Katolik: Memahami Keselamatan**, OBOR, Jakarta.

- Komisi Wali Gereja Indonesia, 2001, *Kitab Hukum Kanonik*, OBOR, Jakarta.
- _____, 2001, *Alkitab*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.
- Laughlin, 1990, R., **A Model of Financial Accountability and The Church of England**, *Financial Accountability and Management*, p. 93-114.
- Lightbody, M., 2000, **Storing and Shielding: Financial Management Behaviour in A Church Organization**, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 13, Iss. 2, p.156.
- Petroni, Alberto, 1999, **Managing Information System Contingencies in Bank: A Case Study**, *Disaster Prevention and Management*, Vol 8 Number 2, pp: 101-110.
- Scott, William, 1997, *Financial Accounting Theory*, Prentice Hall, International Inc.
- Solomons, D., 1986, *Making Accounting Policy: The Quest for Credibility in Financial Reporting*, Oxford University Press, New York.
- Stock, William, 1995, **Church Reporting Made Easy: A Controller Brings Business Accounting to A Nonprofit Organization**, *Management Accounting*, March, p. 56-59.
- Surifah, 1999, **Study tentang Indikasi Unsur Manajemen Laba pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia**, *JAAI*, Vol 5 No 1.
- Susanto, Djoko, 1997, **Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan**, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Hal: 30-49.
- Yin, R., 1988, *Case Studies Research: Design and Methods*, Sage Publication, Beverly Hills, CA.
- Warindrani, Armila Krisna, 2003, **Pengembangan Sistem Informasi Operasional dan Sistem Pakar dalam Proses Pelayanan Kredit Guna Menciptakan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia Majenang Kabupaten Cilacap)**, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga*.
- Wolk, H. dan Michael Tearney, 1997, *Accounting Theory: A Conceptual and Institutional Approach*, 4 th Edition, Cincinnati: South Western College Publishing.

METODOLOGI PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Proposisi	Unit Analisis	Sumber Data	Teknik Analisis
1	Apa karakteristik dasar Gereja katolik yang perlu dipahami dalam rangka pengembangan penyelenggaraan Akuntansi Gereja Katolik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Alkitab sebagai pegangan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan beragama membuat Gereja Katolik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi lainnya dalam menyelenggarakan akuntansi. ❖ Anggota struktural Gereja Katolik adalah manusia yang memiliki kelemahan, sehingga memungkinkan melakukan kelalaian dalam pengelolaan dana Gereja Katolik sehingga membutuhkan alat pertanggungjawaban ❖ Teori keagenan memandang bahwa Gereja Katolik sebagai kumpulan kontrak sehingga diperlukan alat pertanggungjawaban. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kontrak Kerja ❖ Dokumen-dokumen permanen 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumentasi ❖ Observasi ❖ Wawancara 	Analisis Deskriptif
2	Bagaimana kerangka konseptual akuntansi Gereja Katolik yang ideal, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan karakteristik Gereja Katolik	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Akuntansi Gereja Katolik memerlukan kerangka konseptual yang ideal sebagai standar dalam penerapan akuntansi guna mempermudah pelaksanaan kegiatan akuntansi Gereja Katolik 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Laporan Keuangan ❖ Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dokumentasi ❖ Observasi ❖ Wawancara 	<i>Explanation Building</i>

**LAPORAN KEUANGAN
KEUSKUPAN SURABAYA
BULAN.....**

NO	PENERIMAAN	JUMLAH
	Saldo per	Rp
1	Kolekte	Rp
2	Persembahan	Rp
3	Bunga Bank	Rp
4	Devotionalia	Rp
5	Biaya Administrasi	Rp
6	Hasil Usaha/Penjualan	Rp
6.1		Rp
6.2		Rp
7	Sumbangan Bebas	Rp
8	Sumb. Dgn maksud tertentu	Rp
9	Stipendium/Turan Stole	Rp
10	Subsidi Transportasi	Rp
11	Pengembalian Pinjaman	Rp
12	Ambil dari Bank	Rp
13	Lain-lain	Rp
13.1		Rp
13.2		Rp
	Jumlah Pemasukan	Rp
	Jumlah Pengeluaran	Rp
	SALDO KAS	Rp

SALDO BUKAN KAS		
a	Simpanan Bank	Rp
b	Berupa Emas, dsb	Rp
c	Pinj. Belum Kembali	Rp
	Jumlah Saldo Bukan Kas	Rp

NO	PENGELUARAN	JUMLAH
1	Ibadat	Rp
2	Pewartaan	Rp
3	Komsos	Rp
4	Organisasi	Rp
5	Administrasi	Rp
6	Pastoran	Rp
7	Pegawai/Katekis Paroki	Rp
8	Kendaraan/Transport	Rp
9	Pemeliharaan Inventaris	Rp
10	Pajak/Telp	Rp
11	PLN/PAM	Rp
12	Sumb ke Keuskupan	Rp
12.1	Solidaritas	Rp
12.2	Minggu Ke V	Rp
12.3	Aksi Remaja	Rp
12.4	M. Panggilan	Rp
12.5	KOMSOS (Paskah VII)	Rp
12.6	Tahta Suci (Juni IV)	Rp
12.7	BLN KS	Rp
12.8	Minggu Misi	Rp
12.9		Rp
13	Sumbangan Sosial	Rp
14	Devotionalia	Rp
15	Pinjaman	Rp
16	Lain-lain	Rp
16.1		Rp
16.2		Rp
	Jumlah Pengeluaran	Rp

USKUP

(.....)

BENDAHARA KEUSKUPAN

(.....)

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**Keuskupan :**

Periode s/d

PENERIMAAN**Penerimaan Gereja**

Kolekte Minggu (70 %)	Rp.	
Kolekte lainnya	Rp.	
Kartu Persembahan	Rp.	
Bunga Bank	Rp.	
Devotionalia	Rp.	
Sumbangan internal	Rp.	
Sumbangan eksternal	Rp.	
Sumbangan dari instansi lain	Rp.	
Penerimaan lain-lain	<u>Rp.</u>	
Total Penerimaan Gereja		Rp.

Penerimaan Dana Papa

Kolekte Minggu (25 %)	Rp.	
Bunga Bank	Rp.	
Sumbangan eksternal	Rp.	
Sumbangan dari instansi lain	Rp.	
Sumbangan dari Kas lain	Rp.	
Penerimaan lain-lain	<u>Rp.</u>	
Total Penerimaan Dana Papa		Rp.

Penerimaan Pastoran

Kartu Persembahan	Rp.	
Sumbangan Umat	Rp.	
Stipendium / Iura Stolae	Rp.	
Sumbangan dari Kas lain	Rp.	
Penerimaan lain-lain	<u>Rp.</u>	
Total Penerimaan Pastoran		Rp.

Penerimaan Kepemudaan

Kolekte Minggu (5 %)	Rp.	
Sumbangan eksternal	Rp.	
Sumbangan dari instansi lain	Rp.	
Sumbangan dari Kas lain	Rp.	
Penerimaan lain-lain	<u>Rp.</u>	
Total Penerimaan Kepemudaan		Rp.

Total Penerimaan Rp.

PENGELUARAN**Pengeluaran Gereja**

Liturgi / Ibadat	Rp.
Katekese	Rp.
Kerasulan Kitab Suci	Rp.
Komsos / Majalah Paroki	Rp.
Pengeluaran Pastoral lainnya	Rp.
Perawatan Gedung / Inventaris	Rp.
PAM / PLN / Telpon / HP	Rp.
Kendaraan / transportasi	Rp.
Administrasi	Rp.
Devotionalia	Rp.
Uang saku pastor paroki	Rp.
Pengeluaran gereja lainnya	Rp.
Sumbangan DSP	Rp.
Sumbangan ke instansi lain	Rp.
Gaji / honor karyawan	Rp.
Iuran Yadapan karyawan	Rp.
Biaya karyawan lainnya	Rp.
Beban penyusutan	Rp.
Pengeluaran lain-lain	<u>Rp.</u>
Total Pengeluaran Gereja	Rp.

Pengeluaran Dana Papa

Bantuan Pendidikan	Rp.
Bantuan Pengobatan	Rp.
Bantuan Penghidupan	Rp.
Bantuan Perumahan	Rp.
Bantuan Modal Usaha	Rp.
Bantuan karitatif lain	<u>Rp.</u>
Total Pengeluaran Dana Papa	Rp.

Pengeluaran Pastoran

Pangan	Rp.
Sandang	Rp.
Pengobatan	Rp.
Rekreasi	Rp.
Pengeluaran RT lainnya	Rp.
Sumbangan ke Tarekat / Unio	Rp.
Sumbangan unt. Dana Miskin	Rp.
Gaji / honor karyawan	Rp.
Iuran Yadapen karyawan	Rp.
Bantuan medis karyawan	<u>Rp.</u>
Total Pengeluaran Pastoran	Rp.

Pengeluaran Kepemudaan

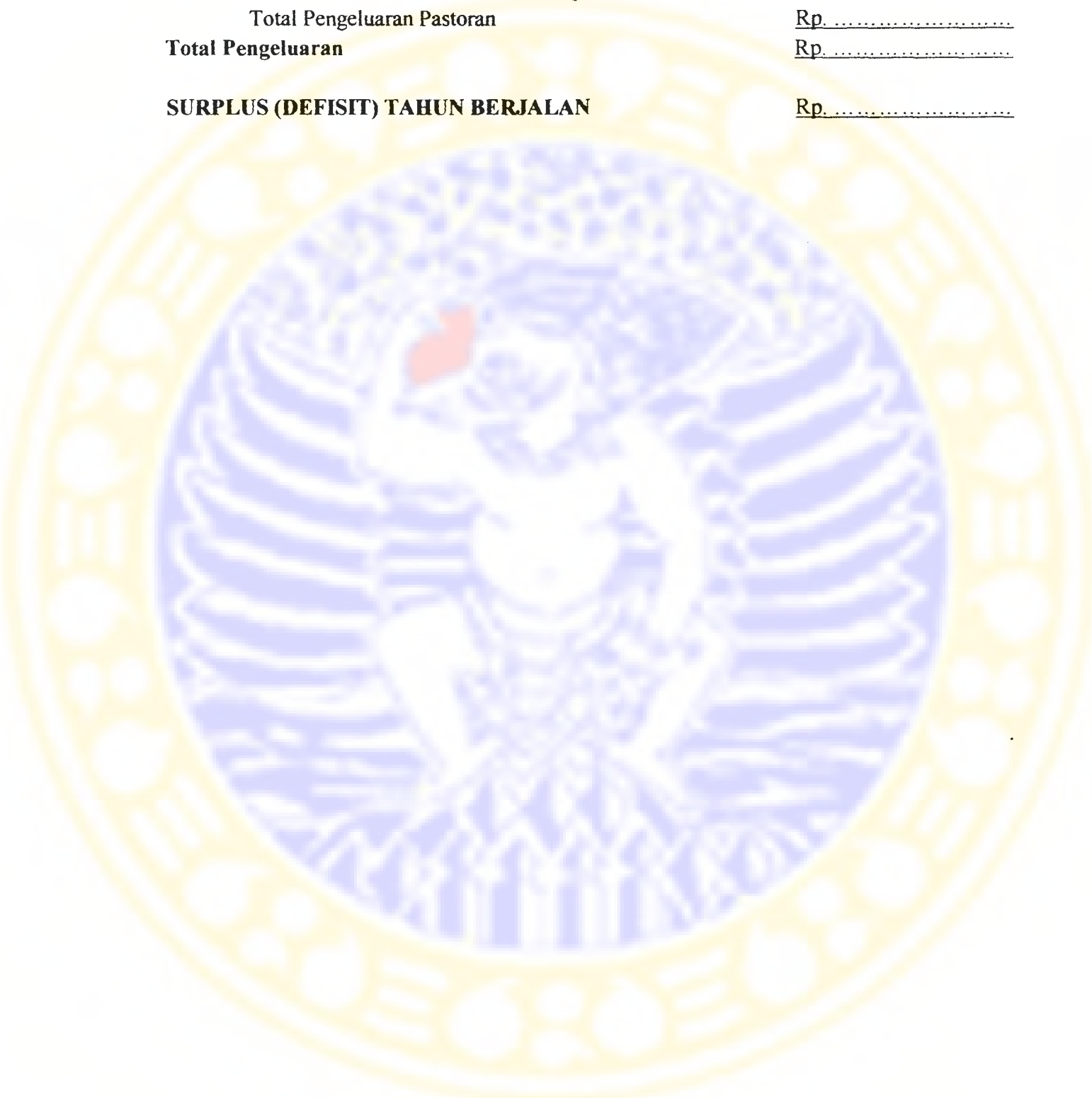
Kepemudaan Rp.

Administrasi Rp.

Total Pengeluaran Pastoran Rp.

Total Pengeluaran Rp.

SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN Rp.



NERACA

Lampiran 4

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
Keuskupan:.....
Per tanggal

AKTIVA

Kas :

Kas Rp.
Kas Kecil Rp.

Rp.

Rekening Bank :

Bank A - Giro I Rp.
Bank B - Tabungan Rp.
KWI - Rekening Rp.

Rp.

Deposito / Titipan :

Bank A - Deposito Rp.
Bank B - Deposito Rp.

Rp.

Pinjaman Karyawan

Pinjaman Karyawan A Rp.
Pinjaman Karyawan B Rp.
Pinjaman Lain Rp.

Rp.

Piutang :

Piutang Sementara Rp.
Piutang lainnya Rp.

Rp.

Tanah :

Tanah Gereja Rp.
Tanah lainnya Rp.

Rp.

Gedung :

Gedung Gereja Rp.
Gedung Pertemuan Paroki Rp.
Gedung Pastoran Rp.
Gedung lainnya Rp.
Akum. Penyusutan Gereja Rp.
Akum. Penyusutan Gedung Paroki Rp.
Akum. Penyusutan Gedung Pastoral Rp.

Rp.

Inventaris :

Kendaraan bermotor Rp.
Peralatan Kantor Rp.
Peralatan Rumah Tangga Rp.
Akum. Penyusutan Kend. Bermotor Rp.
Akum. Penyusutan Peralatan Kantor Rp.
Akum. Penyusutan Peralatan RT Rp.

Rp.

Total Aktiva

Rp.

PASSIVA

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kewajiban yang masih harus dibayar :

Dana Pembangunan	Rp.	
Kolekte Wajib ymh disetor	Rp.	
DSP ymh disetor	Rp.	
Potongan Iuran Yadapen	Rp.	
Potongan Restitusi Obat	Rp.	
Potongan PPh 21	Rp.	
Sumbangan kepada Tarekat	Rp.	
Pinjaman dari pihak lain	Rp.	
Kewajiban lainnya	<u>Rp.</u>	
		Rp.

Aktiva bersih :

Aktiva bersih tahun lalu	Rp.	
Surplus (defisit) tahun berjalan	Rp.	
Selisih kurs valuta asing	Rp.	
Beban penyusutan	Rp.	
Selisih kas	<u>Rp.</u>	
		Rp.

Total Passiva

Rp.

LAPORAN AKTIVITAS

Keuskupan

Periode : s/d

No.	NAMA AKTIVITAS	PENERIMAAN		PENGELUARAN			SALDO
		Dari Paroki	Sumbangan	Operasional	Kegiatan	Aktiva Tetap	
1	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
6	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
8	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	TOTAL	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Lampiran 5

HASIL WAWANCARA

1. SUMBER DATA: ROMO PAROKI

Bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang pertanggungjawaban keuangan menurut ajaran Alkitab?

Gereja Katolik perlu bertanggung jawab terhadap masalah keuangan, karena uang yang didapatkan oleh Gereja Katolik umumnya bersumber pada persembahan umatnya sehingga harus dipertanggungjawabkan kembali untuk kesejahteraan bagi umat Gereja Katolik melalui karya-karya yang dilakukan.

Alkitab sebagai sumber kebenaran yang diimani oleh umat Gereja Katolik mengajarkan beberapa hal tentang pertanggungjawaban keuangan yaitu:

- Lukas 16:1-2, yang menyatakan bahwa setiap orang yang bekerja harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dilakukan kepada pemberi kerja.
- 1 Petrus 3: 15-17, yang menyatakan bahwa bertanggung jawab merupakan bentuk kesalehan atau ketaatan terhadap Tuhan.
- Ibrani 13:17, yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan bentuk ketaatan terhadap pimpinan, termasuk dalam hal ini Paus yang merupakan pimpinan tertinggi Gereja katolik sebagai wakil dari Tuhan sendiri sesuai dengan sejarah pembentukan Gereja Katolik.

Bagaimana bentuk dari pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan tersebut?

Bentuk dari pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan yang umum dilakukan adalah:

- Bentuk pertanggungjawaban keuangan adalah adanya catatan-catatan tentang sumber penerimaan dan pengeluaran Gereja Katolik.
- Pengumuman baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada umat tentang jumlah persembahan yang berhasil dikumpulkan.

SUMBER DATA: ROMO BENDAHARAWAN

Akuntansi adalah alat pertanggungjawaban keuangan. Bagi Gereja Katolik. Apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban terhadap Tuhan?

Pengelola keuangan Gereja Katolik harus bertanggung jawab terhadap Tuhan. Sesuai dengan Ibrani 13:17, bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap pimpinan. Pimpinan tertinggi Gereja Katolik adalah Paus, sehingga seluruh laporan keuangan Gereja Katolik di dunia harus dikirim ke Vatikan tempat Paus berada.

Bagaimana distribusi pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi untuk alat pertanggungjawaban terhadap Tuhan?

Distribusi pelaporan akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban untuk Tuhan dinyatakan dengan pengiriman laporan keuangan dari hasil kegiatan akuntansi ke Vatikan tempat Paus berada sebagai pimpinan tertinggi dalam hirarki Gereja Katolik. Hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan dari hasil kegiatan akuntansi digunakan sebagai alat pertanggungjawaban ke Tuhan sebab menurut sejarah Gereja Katolik, Paus adalah wakil dari Tuhan.

Kepada siapa pelaporan keuangan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban terhadap sesama manusia?

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kegiatan akuntansi Gereja Katolik digunakan sebagai alat pertanggungjawaban terhadap umat manusia meliputi umat

dan donatur, pemerintah, serta masyarakat lain yang terkait dengan Gereja Katolik misalnya para fakir miskin, kelompok yang menderita, dan sebagainya. Melalui laporan keuangan dapat dinilai sampai sejauh mana Gereja Katolik bertanggung jawab terhadap umat manusia. Dasar pertanggungjawaban sesuai dengan alkitab dapat dilihat pada:

- Lukas 16:1-2 dan 1 Petrus 3:15-17, pertanggungjawaban terhadap umat dan donatur.
- Ibrani 13:17 dan Matius 22:17-22, pertanggungjawaban terhadap pemerintah.
- Matius 25:40, pertanggungjawaban terhadap masyarakat lain yang terkait dengan Gereja Katolik.

Bagaimana penyelenggaraan pencatatan mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis Gereja Katolik?

Penyelenggaraan pencatatan mengenai perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis Gereja Katolik berupa:

- **Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**
Laporan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai harta, kewajiban, dan aktiva bersih (modal) pada waktu tertentu.
- **Laporan Penerimaan dan Beban**
Laporan penerimaan dan beban menyajikan informasi mengenai penerimaan dan beban yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu.

- **Laporan Aktivitas**

Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan dari kegiatan yang dibiayai oleh keuangan dan/atau menggunakan dari sumber lainnya.

- **Laporan lainnya berupa daftar aktiva tetap atau inventaris**

Daftar aktiva tetap atau inventaris adalah laporan yang menyajikan perincian aktiva tetap yang dimiliki.

Bagaimana perlakuan akuntansi untuk berbagai kasus akuntansi Gereja Katolik misalnya masalah pengukuran dan penilaian persembahan dalam bentuk aktiva tetap?

Sumbangan berupa aktiva tetap umumnya tidak dinilai dalam bentuk satuan mata uang, akan tetapi hanya dicatat dalam daftar inventaris saja karena keterbatasan etika untuk menanyakan jumlah aktiva tetap dalam bentuk satuan uang.

SUMBER DATA: UMAT DAN DONATUR

Apa yang menjadi motivasi umat memberikan persembahan kepada Gereja Katolik?

Motivasi memberikan persembahan adalah keikhlasan serta keinginan untuk turut serta bagi kemajuan karya Gereja Katolik serta sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima.

Mengapa umat memerlukan pertanggungjawaban atas penggunaan persembahan sebagai sumber daya ekonomis bagi Gereja Katolik?

Pertanggungjawaban penggunaan persembahan tetap perlu dilakukan, hal ini terkait dengan kelemahan manusia, terutama terhadap masalah uang yaitu perbuatan untuk tidak jujur sehingga harus ada batasan yang melindungi bahwa persembahan sudah dikelola dengan baik.

Bagaimana bentuk pelaporan yang diinginkan sebagai alat pertanggungjawaban?

Bentuk pelaporan keuangan yang diinginkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang mampu mencerminkan kejujuran serta mampu menunjukkan bahwa pengelola keuangan Gereja sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Apakah pelaporan sebagai alat pertanggungjawaban tersebut masih memerlukan pihak independen untuk memberikan jaminan atas kewajaran pelaporan yang telah diselenggarakan oleh Gereja Katolik?

Pihak independen seperti auditor masih diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Gereja Katolik telah disajikan dengan wajar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat tingkat kepercayaan umat dan donatur terhadap orang-orang yang duduk sebagai pengelola keuangan Gereja.



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 ☎ 031-70985235, 5016090 Faks 5016090

Berita Acara Ujian Proposal / Tesis

Nama : R. Bernadinus Christianto
 NIM : 200214814/11
 Tanggal Ujian : 12 Agustus 2005

No	Halaman	Revisi	Nama Pengusul	Paraf & Tgl Persetujuan
1.		lap. keu (dijangka) ubahan bahan analisis.	M. Sugumar	Prof. Papwoto
2.	74.	Simpulan ke 2.	M. Sugumar	Prof. Papwoto
3.	4-5.	Rumusan masalah ke 1.		
4.		kerangka konseptual & perbandingan.		
5.		Standar op. dan sistematis pelayanan. Gts. di gereja.		
6.		Analisis dan analisis dikembangkan konsep. Gts. (di) gereja.		
7.		Standar pbs & gereja dan siapa standar & gereja.		
8.		Publikasi.	M. Sugumar	
9.		Melacak kerangka fin.	Prof. Parwoto	10-10-05
10.		Secu APB No 4.		
11.		Simpulkan & simpulan dan saran		

draft sudah saya terima dan dalam proses editing.

10.10.05

Sekretaris
Dosen Pembimbing

[Signature]
R. Bernadinus Christianto